

LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022

The image features three 3D house models. The central model is red and prominently displays the official seal of Kabupaten Pamekasan on its front facade. It is flanked by two white models, which also bear the same seal. The houses are set against a light gray background with a subtle architectural pattern. A large, solid red diagonal band cuts across the lower portion of the page, serving as a background for the bottom text.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mendukung pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun-tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022 akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan program/kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Pamekasan, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



MUHARRAM, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
D. Landasan Hukum	25
E. Sistematika	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. Rencana Strategis	27
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	35
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	64
B. Realisasi Anggaran.....	84
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
BAB IV PENUTUP.....	100
LAMPIRAN	102
- Matriks Renstra 2018-2023 dan Perubahannya	102
- Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya	160
- Matriks Renja 2022 dan Perubahannya	163
- PK Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya	175
- Laporan Evaluasi Hasil Renja s.d. Triwulan IV	181
- Penghargaan Yang Pernah Diperoleh Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	207

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	30
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2022.....	35
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2022	37
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan (Awal) Tahun 2022	38
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	49
Tabel 2.7	: Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022...	51
Tabel 3.1	: Pengkategorian Capaian Kinerja.....	63
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama	65
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja.....	68
Tabel 3.4	: Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	71
Tabel 3.5	: Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	72
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	74
Tabel 3.7	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan.....	76
Tabel 3.8	: Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	84
Tabel 3.9	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	91
Tabel 3.10	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina
Konstruksi;

2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;

3) Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan.

D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih membawahi:

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, Kawasan Permukiman dan Sanitasi ;
- 2) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman Dan Air Bersih ;
- 3) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Uraian Berdasarkan dari Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta

monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas perencanaan, evaluasi, pelaporan kinerja dan anggaran, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan peraturan perundangan – undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian

Sub bagian perencanaan, umum, dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas ;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Kantor ;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan, dan pengadaan barang kebutuhan Dinas ;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas ;

- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian ;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
- j. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
- k. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas ;
- l. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan dinas ;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas ; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan pengembangan dan pengendalian perumahan, tata bangunan, dan tata konstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;

- c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- f. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- h. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan;
- i. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- m. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;

- o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- p. Penilaian kinerja bawahan;
- q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- r. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ada;
- t. Pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya;
- v. Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 Seksi yaitu Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi, Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, dan Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan. Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- b. Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
- c. Melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;

- d. Melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten;
- f. Melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
- g. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
- i. Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- k. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
- l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- m. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- n. Melaksanakan penyusunan site plan dan/atau ded rumah korban bencana atau relokasi program, pengadaan lahan dan pembangunan rumah bagi korban bencana, dan operasional pemeliharaan lingkungan perumahan;
- o. Melaksanakan distribusi rumah bagi korban bencana dan relokasi, serta pemenuhan tata usaha serah terima rumah bagi korban;

- p. Melaksanakan fasilitasi penatausahaan dan pemanfaatan, dan pengelolaan kelembagaan pemilik rumah susun;
- q. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
- r. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- s. Menilai kinerja bawahan;
- t. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- u. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan

Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan penyediaan PSU perumahan;
- b. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- d. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyelenggaraan PSU perumahan;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- g. Melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- h. Menerapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan;

- i. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. Menilai kinerja bawahan;
- m. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan, bantuan teknis penyusunan program, dan pembiayaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya, pembinaan teknis dan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah, serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
- p. Menyusun bahan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- q. Menyusun bahan pembinaan teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- r. Menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang – undangan, pedoman, dan standar teknis pembangunan gedung beserta lingkungannya ; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;

- b. Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- c. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- d. Melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
- e. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten;
- f. Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- g. Melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
- h. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan
- i. Melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
- j. Melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator
- k. Melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana
- l. Melaksanakan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan
- m. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
- n. Melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
- o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum;

- q. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi;
- t. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- u. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program, serta identifikasi lahan potensial lokasi relokasi perumahan;
- v. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana dan data tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
- w. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi;
- x. Pelaksanaan sosialisasi mekanisme dan syarat teknis calon penerima rumah bagi korban bencana dan mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
- y. Pemrosesan dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan izin lokasi penanaman modal;
- z. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan perumahan prasarana sarana dan utilitas umum;
- aa. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- bb. menilai kinerja bawahan;

- cc. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- dd. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ee. Menyusun bahan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerjasama teknis dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi terkait ;
- ff. Melaksanakan penyebarluasan perundang-undangan bangunan gedung dan jasa konstruksi kepada para penyelenggara pembangunan ;
- gg. Melaksanakan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ;
- hh. Menyusun bahan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi dan pengawasan dalam rangka tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ;
- ii. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penelitian bidang jasa konstruksi;
- jj. Melaksanakan pendaftaran dan penetapan fungsi bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya ;
- kk. Menyusun bahan pembinaan teknis pengalihan status dan hak bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
- ll. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Kawasan Permukiman,

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
- e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan pelaksanaan registrasi dan sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan rumah dan PSU dengan kemampuan kecil;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- h. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- i. Analisis data dan informasi kinerja bidang kawasan permukiman;
- j. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- k. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;

- l. Penilaian kinerja bawahan;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang kawasan permukiman;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Perencanaan, penataan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta penyehatan lingkungan permukiman;
- p. Fasilitasi dalam rangka perencanaan penyusunan program, kebijakan, dan strategi peningkatan dan pemeliharaan serta penyehatan lingkungan permukiman;
- q. Pengendalian, fasilitasi, pembinaan, dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyehatan lingkungan permukiman ; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih dibantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu Seksi Pendataan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi, Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Seksi Pemanfaatan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih, Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi

Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- b. Melaksanakan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;

- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- d. Melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. Melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
- g. Melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- i. Melaksanakan penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
- k. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
- l. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- n. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- o. Melaksanakan pendataan dan verifikasi; penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
- p. Melaksanakan pelaksanaan pemrosesan dan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- s. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- u. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- v. Menilai kinerja bawahan;
- w. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- x. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- y. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman;
- z. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
- aa. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana sanitasi ;
- bb. Menyusun bahan pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana sanitasi, serta

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;

- cc. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan sanitasi, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
- dd. Menyusun bahan evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman ; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh, pelaksanaan registrasi dan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- f. Melaksanakan tata usaha penyerahan rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh;
- g. Melaksanakan registrasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- h. Melaksanakan pemrosesan dan penyiapan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- i. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- l. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- m. Menilai kinerja bawahan;
- n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana air bersih;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
- r. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana air bersih;
- s. Menyusun bahan petunjuk pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana air bersih, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;

- t. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan air bersih, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
- u. Menyusun bahan evaluasi kinerja pelayanan penyelenggara air bersih ; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

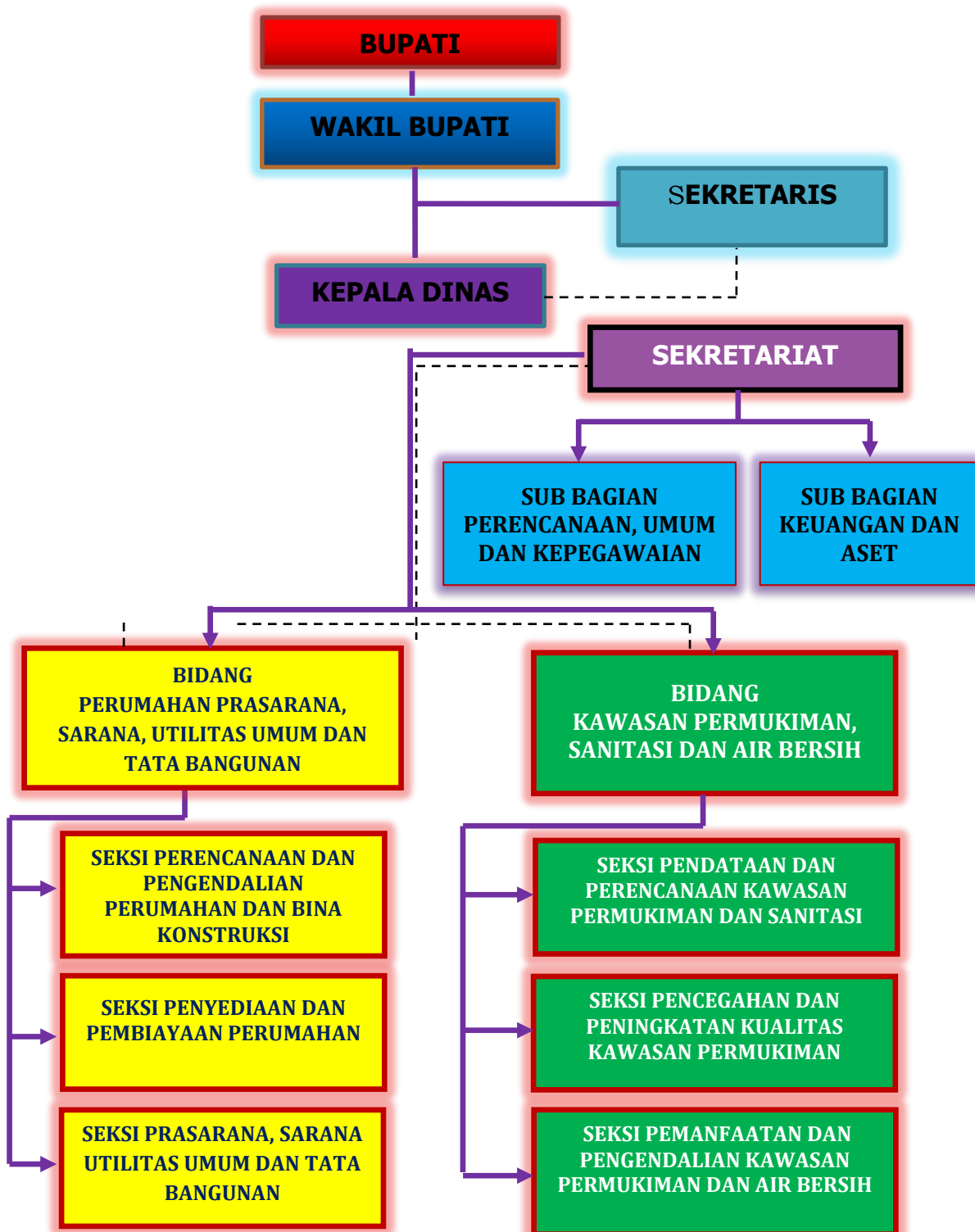
- a. Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- f. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- g. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan

permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

- h. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- i. Melaksanakan survey tentang system drainase perkotaan, serta menyusun rencana dan gambar;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perbaikan rumah tidak layak huni, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- l. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
- m. Melaksanakan kebijakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- n. Melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- o. Memberi bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- q. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;

- s. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- t. Menilai kinerja bawahan;
- u. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- v. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sumber : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020

C Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Ketersediaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan.
3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
5. Pengelolaan air limbah/sanitasi dari akses aman menjadi akses layak.
6. Kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum belum memadai.
7. Luasan kawasan perkotaan dan kawasan infrastruktur perdesaan (kawasan minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa).
8. Penyerahan PSU Perumahan oleh pihak pengembang perumahan ke pihak Pemkab.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mendukung pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya);
2. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat;
3. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, saluran sanitasi dan air bersih terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas perumahan yang layak huni, saluran sanitasi dan air bersih.
5. Keterbatasan lahan penyediaan sarana sanitasi dan keterbatasan sumber air bersih.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

E Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, isu strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang RAJJHA, BAJJHRA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**" Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"**

Terdapat beberapa pokok-pokok visi antara lain:

- *Pamekasan Rajjha*, artinya merupakan gambaran tata kelola kota yang didasarkan pada karakter lokal, rapi, asri, memiliki nilai estitika tinggi, serta memiliki perspektif ekonomis dan sustainability. Pamekasan.
- *Pamekasan Bajjhra*, artinya konsep keberuntungan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah Pamekasan, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan bagi masyarakat

Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomis.

- **Pamekasan Parjhuga**, artinya merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata.
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung pada Misi ke -4, yaitu : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mendukung kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan yaitu meningkatkan pemenuhan dan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, dan 2 sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart, dan meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	- Rasio Permukiman Layak Huni	59,31 %	59,52 %	59,73 %	59,95 %	60,09 %
			- Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33 %	56,72 %	67,83 %	78,94 %	90,06 %
			- Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	5 %	10 %	20 %	60 %	80 %
		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,33 %	97,17 %	97,37 %	97,57 %	97,77 %
			- Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	97,48 %	84,03 %	63,03 %	42 %	21 %
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	53,53 %	54,53 %	55,53 %	56,53 %	57,53 %
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	63,65 %	64,65 %	65,65 %	66,65 %	67,65 %

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M,PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	%	Pemukiman layak huni yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung (PSU) dengan penataan sesuai standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat	(Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman) X 100 %	DPRKP
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	%	suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				(persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.		
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	(Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah Kab. Pamekasan) X 100%	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%)	(Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) X 100%	SK Bupati tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	(Jumlah rumah tangga dengan air minum layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	$\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \right) \times 100 \%$	Data Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pamekasan
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Penilaian SAKIP 2022 : Perencanaan Kinerja 25% Pengukuran Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 10% Evaluasi Kinerja 20% Capaian Kinerja 20%	Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan, Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,		Rasio Permukiman Layak Huni	%	59,95
		Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	78,94
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	%	60
		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,57
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	42
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	56,53
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	66,65

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 mendukung pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 03 Februari Tahun 2022 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59,95 %
2.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	60%
3.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,57%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	42%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%
4.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp32,687,139,869	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp7,004,688,300	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp2,725,130,499	APBD

4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp77,409,894,800	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp9,900,000,000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp32,850,000,000	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp375,000,000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp2,307,492,162	APBD
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp12,604,920,000	APBD + APBN
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp13,142,500,000	APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp100,000,000	APBD
JUMLAH		Rp191,106,765,630	APBD + APBN

Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan (Awal) Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	32.687.139.869
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	12 SPAM	32.687.139.869

1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	300.000.000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	7 Desa	650.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	181 Dusun	21.197.496.851
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	4 Desa	500.000.000
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	1 Desa	5.058.690.118
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	2 Desa	250.000.000
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	5 Desa	550.000.000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	4 KKM	1.360.410.900
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	150.000.000
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara	1 kegiatan	100.000.000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	12 Desa	2.320.542.000
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	3 Desa	250.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	66,65%	7.004.688.300
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	8 SPAL	7.004.688.300

1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	8 Desa	1.306.745.300
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Teknik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	35 SDM	100.000.000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	32 Peserta	100.000.000
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan	12 SDM	100.000.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	2 Desa	100.000.000
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan	1 Kegiatan	114.000.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	9 Desa	5.083.943.000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun	1 unit	100.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	50,75%	2.725.130.499
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	2.725.130.499
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	8 Desa	1.200.000.000
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	9 Desa	1.425.130.499

1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	100.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	70%	77.409.894.800
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	77.409.894.800
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	495 Unit	77.009.894.833
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	2 unit	199.999.967
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan	2 Dokumen	200.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	28%	9.900.000.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	9.900.000.000
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	300.000.000

1.03.08.2.01 .02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	3 Dokumen	435.000.000
		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	6 Sarpras	800.000.000
		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	2 Gedung Kantor	8.365.000.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	39%	32.850.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	32.850.000.000
1.03.09.2.01 .03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	232 Unit	32.850.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	375.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	200.000.000
1.03.11.2.01 .04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	100 Orang	150.000.000
1.03.11.2.01 .06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	100 Orang	50.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	28,57%	175.000.000
1.03.11.2.04 .01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 Dokumen	25.000.000
1.03.11.2.04 .02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 Orang	100.000.000

1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	50 Badan Usaha	50.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	97.047.500
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	97.047.500
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	77 Dokumen	5.247.500
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	24 dokumen	4.800.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	37.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	3.093.906.530
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	3.093.906.530
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	3.093.906.530
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	118.530.000

1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	118.530.000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	118.530.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	100%	1.847.955.387
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 Sarana	351.173.719
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Komponen	5.760.000
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 Peralatan Kantor	41.011.969
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	16 Alat Kebersihan	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	39.700.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Barang	37.721.750
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali	226.980.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Prasarana	623.182.600
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Kendaraan	330.093.500
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	5 Kendaraan	118.123.500
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	27 unit	174.965.600
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	634.939.068

1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jasa Layanan	8.375.000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6 Jasa Layanan	70.664.068
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Jasa Layanan	555.900.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	238.660.000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Kendaraan	119.921.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	148 unit	28.789.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	19 Ruang	89.950.000
		Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara / direhabilitasi		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,04%	2.307.492.162
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	6 Pendataan	599.999.580
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930

1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	40,39%	1.507.499.990
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	41 Unit	717.500.000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun	1 Dokumen	49.999.990
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan	1 Unit	100.000.000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	10 Unit	300.000.000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun	10 Unit	300.000.000
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	40 Unit	40.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	25%	100.000.000
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	5 Izin	50.000.000

1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan	5 Koordinasi	50.000.000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	50 Unit	99.992.592
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikoordinasikan	100 Unit	99.992.592
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	92%	12.604.920.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	50%	1.035.000.000
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan	1 Paket	300.000.000
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	2 Dokumen	650.000.000
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	1 Paket	85.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	350.000.000

1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	350.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	11.219.920.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	270 Unit	9.962.420.000
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koordinasi	1.257.500.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	96,04%	13.142.500.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	13.142.500.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	751 Unit	13.142.500.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	66,66%	100.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	44,44%	100.000.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	2 PSU	100.000.000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 5 Desember tahun 2022 telah dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59,95 %
2.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standar	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	60%
3.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,57%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	42%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%

		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%
4.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp 33.487.139.869	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.890.688.300	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 6.775.130.499	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 103.186.894.800	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 8.925.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 35.150.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 350.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.257.499.626	
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp 11.759.920.000	APBD + APBN
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp13,142,500,000	APBD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp100,000,000	APBD
JUMLAH		Rp 221.024.773.094	APBD + APBN

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2022. Berikut rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.7

**Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	33.487.139.869
1.03.03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	11 SPAM	33.487.139.869
1.03.03.2. 01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	300.000.000
1.03.03.2. 01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	7 Desa	1.050.000.000
1.03.03.2. 01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	214 Dusun	24.297.496.851
1.03.03.2. 01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	4 Desa	500.000.000
1.03.03.2. 01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	1 Desa	3.458.690.118
1.03.03.2. 01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	2 Desa	250.000.000
1.03.03.2. 01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	5 Desa	550.000.000
1.03.03.2. 01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	4 KKM	360.410.900

1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	150.000.000
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara	1 kegiatan	-
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	12 Desa	2.320.542.000
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	3 Desa	250.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	66,65%	6.890.688.300
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	8 SPAL	6.890.688.300
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	8 Desa	1.406.745.300
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	35 SDM	100.000.000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	32 Peserta	100.000.000
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan	12 SDM	100.000.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	2 Desa	100.000.000
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan	1 Kegiatan	-

1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	9 Desa	5.083.943.000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun	1 unit	-
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	50,75%	6.775.130.499
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	6.775.130.499
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	35 Desa	5.250.000.000
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	9 Desa	1.425.130.499
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	100.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	70%	103.186.894.800
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	103.186.894.800
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	658 Unit	102.986.894.833
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	2 unit	199.999.967
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan	2 Dokumen	-

1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	28%	8.925.000.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	8.925.000.000
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	300.000.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	3 Dokumen	8.625.000.000
		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	6 Sarpras	
		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	2 Gedung Kantor	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	39%	35.150.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	35.150.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	242 Unit	35.150.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	350.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	200.000.000

1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	100 Orang	150.000.000
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	100 Orang	50.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	28,57%	150.000.000
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 Dokumen	-
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 Orang	100.000.000
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	50 Badan Usaha	50.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	105.852.500
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	105.852.500
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	77 Dokumen	5.247.500
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	24 dokumen	4.800.000

1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	45.805.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	2.931.319.194
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	2.931.319.194
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	2.931.319.194
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	142.530.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	142.530.000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	142.530.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	100%	1.974.086.218
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 Sarana	361.318.750
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Komponen	5.760.000
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 Peralatan Kantor	44.102.000
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	16 Alat Kebersihan	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	41.755.000

1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Barang	42.721.750
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali	226.980.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Prasarana	623.182.600
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Kendaraan	330.093.500
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	5 Kendaraan	118.123.500
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	27 unit	174.965.600
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	681.939.068
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jasa Layanan	8.375.000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6 Jasa Layanan	117.664.068
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Jasa Layanan	555.900.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	307.645.800
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan	5 Kendaraan	153.906.800
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	148 unit	43.789.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	19 Ruang	109.950.000

1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,04%	1.257.499.626
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	6 Pendataan	499.999.626
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	2 Kecamatan	99.999.918
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.918
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	2 Kecamatan	99.999.930
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan	2 Kecamatan	-
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	40,39%	757.500.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	41 Unit	717.500.000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun	1 Dokumen	-

1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan	1 Unit	-
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	10 Unit	-
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun	10 Unit	-
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	40 Unit	40.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	25%	-
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	5 Izin	-
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan	5 Koordinasi	-
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	50 Unit	-
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang dikoordinasikan	100 Unit	-
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	92%	11.759.920.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	50%	190.000.000

1.04.03.2. 01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan	1 Paket	-
1.04.03.2. 01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	2 Dokumen	190.000.000
1.04.03.2. 01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	1 Paket	-
1.04.03.2. 02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	350.000.000
1.04.03.2. 02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	350.000.000
1.04.03.2. 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	11.219.920.000
1.04.03.2. 03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	270 Unit	9.962.420.000
1.04.03.2. 03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koordinasi	1.257.500.000

1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	96,04%	13.142.500.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	13.142.500.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	751 Unit	13.142.500.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	66,66%	100.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	44,44%	100.000.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	2 PSU	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan,

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah,

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran,

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut,

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan,

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No,	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas		Rasio Permukiman Layak Huni	59,95%	52,90%	88,24%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%	95,35%	120,79%	Sangat Baik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	60%	56,40%	94,00%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,57%	92,43%	94,73%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	42%	30,23%	71,98%	Kurang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%	43,97%	77,78%	Kurang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%	37,15%	55,74%	Kurang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	83,95	98,76%	Cukup	Inspektorat

Analisa capaian kinerja pada tabel diatas ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target kinerja sasaran yang belum tercapai di tahun 2022 ini.

Salah satu contoh keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran yaitu pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung dimana capaian kinerjanya melebihi 100% sehingga masuk dalam kategori 'Sangat Baik'. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF yang tinggi. Begitu juga dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni dimana pada tahun 2022 telah ditargetkan sebanyak 1753 Unit yang akan dikerjakan, namun pada realisasinya terselesaikan 1752 unit rumah dikarenakan ada 1 orang yang menolak, sehingga kategori capaian yang dihasilkan 'Cukup' yaitu sebesar 99,90%. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif dan juga dukungan anggaran belanja baik fisik maupun operasionalnya.

Sebaliknya pada indikator sasaran Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan pencapaian target kinerjanya masuk dalam kategori 'Kurang' yakni 55,74%, hal ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran kegiatan pada sub-sub kegiatan fisiknya. Sehubungan dengan waktu pengesahan PAK yang tidak kondusif dengan waktu pengerjaannya, akhirnya diputuskan untuk tidak dikerjakan pada tahun berlangsung. Dengan adanya perubahan anggaran kegiatan yang tidak digelar ini menyebabkan capaian kinerja baik target maupun keuangannya jadi menurun. Hal tersebut diatas juga terjadi pada

indikator sasaran Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, dan indikator sasaran Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No,	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,		Rasio Permukiman Layak Huni	59.73%	57.05%	95.52%	59,95%	52,90%	88,24%
2		Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	67.83%	100%	78,94%	95,35%	120,79%
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	20%	11.86%	59.30%	60%	56,40%	94,00%
3		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,37%	96.35%	98.95%	97,57%	92,43%	94,73%
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	63.03%	62.10%	98.53%	42%	30,23%	71,98%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%	53%	94.63%	56,53%	43,97%	77,78%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%	62.52%	95.23%	66,65%	37,15%	55,74%
4		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	83.69	98.46%	85.00	83,95	98,76%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan pada tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2022 rata-rata meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hasil capaian kinerja sasaran yang diperoleh dapat dilihat dari perbandingan indikato-indikator sasaran yang diharapkan dengan realisasinya atau membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai,

1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart**Indikator**

- Pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung, capaian kinerjanya di tahun 2021 masuk dalam kategori 'Sangat Baik' dimana capaian kinerjanya 120,79%. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan gedung sangat tinggi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah target pemohon yang mengajukan PBG & SLF dengan jumlah realisasi IMB yang sudah diterbitkan sehingga perbandingan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 = 100%, dan pada tahun 2022 = 120,79%.
- Pada indikator prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, capaian kinerjanya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun kategori capaiannya masih 'Cukup'. Dengan capaian kinerja sebesar 94,00% hal ini menunjukkan bahwa target kegiatannya hampir seluruhnya terealisasi. Ada salah satu sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran kegiatan yang waktu pengesahannya mepet dengan akhir tahun sehingga tidak bisa terealisasi.

2. Sasaran II : Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat**Indikator**

- Pada tahun 2022 ini target jumlah rumah yang diperbaiki menjadi rumah layak huni sebanyak 1753 unit rumah, sehingga jumlah rumah layak

huninya di Kabupaten Pamekasan meningkat. cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2022 ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dimana realisasi kegiatannya terealisasi 12 unit rumah yang diperbaiki dari target 41 unit rumah. Hal tersebut diatas yang menyebabkan pencapaian kinerja pada tahun 2022 lebih kecil daripada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut belum ada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Capaian kinerja pada indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021 yakni 98,95% dan pada tahun 2022 yaitu 94,73%.

- Pada indikator penurunan luasan kawasan kumuh, pencapaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran dan kegiatan yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan PAK tersebut tidak dilaksanakan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada capaian kinerja pada indikator sasaran penurunan luasan kawasan kumuh.
- Pada indikator proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, pencapaian kinerjanya termasuk kategori Kurang dengan capaian 77,78% pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan PAK yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Kegiatan SPAM pada tahun 2022 lingkup kegiatannya mencakup jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan, berbeda pada tahun sebelumnya yang hanya mencakup kawasan perdesaan saja.
- Pada indikator proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, capaian kinerjanya menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni, 95,23% di tahun

2021 dan 55,74% pada tahun 2022. Faktor penyebab dari menurunnya pencapaian target kinerja ini kurang lebih sama seperti indikator sasaran diatasnya dimana ada kegiatan PAK yang tidak bisa dilaksanakan karena waktu pengesahan PAK nya yang mendekati akhir tahun. Sementara untuk pelaksanaan di lapangannya membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kalender. Kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya ada pada sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan dimana targetnya berubah dari 8 desa menjadi 35 desa. dan anggarannya dari 1.200.000.000 menjadi 5.250.000.000. Hal ini yang menyebabkan menurunnya pencapaiannya baik kinerjanya maupun keuangannya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan periode 2018 -2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	52,90%	60.09%	88,03%
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	95,35%	90.06%	131,48%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	56,40%	80%	73,01%
3	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,43%	97.77%	94,78%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	30,23%	21%	39,64%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	43,97%	57.53%	75,21%

		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	37,15%	67.65%	54,66%
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83.95	91	92,25%

Tabel diatas menyajikan tingkat kemajuan capaian sasaran strategis realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir periode renstra 2023. Secara umum tingkat kemajuan dari masing-masing indikator kinerja sasaran sudah sangat baik namun masih ada satu indikator yang masih membutuhkan upaya untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Tidak terlaksananya sebagian kegiatan pada indikator sasaran pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi menyebabkan tingkat kemajuan sasaran strategisnya rendah. Adapun faktor penghambatnya yaitu pengesahan DPA PAK yang mendekati akhir tahun sehingga kegiatan PAK tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	52,90%	-	-
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	95,74%	-	-
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	58,81%	-	-

3	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,43%	100	92,43%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	30,23%	-	-
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	43,97%	100%	43,97%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	37,15%	90%	41,09%
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83.95	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,	Rasio Permukiman Layak Huni	59,95%	52,90%	88,24%	-	-
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%	95,35%	120,79%	-	-
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	60%	56,40%	94,00%	Pengesahan DPA PAK yang mepet tanggal 5 Desember 2022, menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan tambahan di PAK sementara waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kalender	Pengesahan PAK agar dipercepat, usahakan di pertengahan tahun sudah di sahkan
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,57%	92,43%	94,73%		-
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	42%	30,23%	71,98%	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun menyebabkan kegiatan PAK pada pembangunan sistem drainase tidak bisa dilaksanakan, sementara waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kalender	Jadwal perubahan anggaran dan kegiatan agar dipercepat pada akhir triwulan 3 sehingga kegiatan fisik memungkinkan untuk dilaksanakan

		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%	43,97%	77,78%	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun menyebabkan kegiatan PAK pada pembangunan SPAM perdesaan dan perkotaan tidak bisa dilaksanakan, sementara waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kalender	Jadwal perubahan anggaran dan kegiatan agar dipercepat pada akhir triwulan 3 sehingga kegiatan fisik memungkinkan untuk dilaksanakan
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%	37,15%	55,74%	Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun menyebabkan kegiatan PAK pada pembangunan SPAM perdesaan dan perkotaan tidak bisa dilaksanakan, sementara waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kalender	Jadwal perubahan anggaran dan kegiatan agar dipercepat pada akhir triwulan 3 sehingga kegiatan fisik memungkinkan untuk dilaksanakan
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	83.95	98,76%		-

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	88,24%			88,24%	MENUNJANG
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	120,79%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	121,15%	MENUNJANG
3				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	100,00%	MENUNJANG
4				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	122,00%	MENUNJANG
5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	50,00%	MENUNJANG
6				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	50,00%	MENUNJANG
7				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	50,00%	MENUNJANG

8	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	94,00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	121,15%	MENUNJANG
9				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	100,00%	MENUNJANG
10				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	100,00%	MENUNJANG
11					jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	100,00%	MENUNJANG
12					jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	100,00%	MENUNJANG
13				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	93,80%	MENUNJANG
14				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	100,00%	MENUNJANG
15				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	93,80%	MENUNJANG
16				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	103,71%	MENUNJANG
17				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	50,00%	MENUNJANG

18				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	130,00%	MENUNJANG
19				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	130,00%	MENUNJANG
22				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	62,00%	MENUNJANG
23				Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	70,00%	MENUNJANG
24				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	46,00%	MENUNJANG
25	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	94,73%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	29,63%	MENUNJANG
26				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	60,00%	MENUNJANG
27				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	100,00%	MENUNJANG
28				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	100,00%	MENUNJANG
29				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	100,00%	MENUNJANG

30		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	0,00%	TIDAK MENUNJANG
31		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	0,00%	TIDAK MENUNJANG
32		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	29,27%	MENUNJANG
33		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	29,27%	MENUNJANG
34		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	30,00%	MENUNJANG
35		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	100,00%	MENUNJANG
37		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	100,00%	MENUNJANG
39		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	100,00%	MENUNJANG
40		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	100,00%	MENUNJANG
44		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	99,87%	MENUNJANG

45				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	100,00%	MENUNJANG
46				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	99,87%	MENUNJANG
47	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	71,98%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	71,97%	MENUNJANG
48				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	100,00%	MENUNJANG
49				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	71,88%	MENUNJANG
50				Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	100,00%	MENUNJANG
51				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	100,00%	MENUNJANG
52				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100,00%	MENUNJANG
53				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	100,00%	MENUNJANG

54				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	100,00%	MENUNJANG
55				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	100,00%	MENUNJANG
56	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	77,78%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	77,78%	MENUNJANG
57				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	90,91%	MENUNJANG
58				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	100,00%	MENUNJANG
59				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	63,64%	MENUNJANG
60				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	75,70%	MENUNJANG
61				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	100,00%	MENUNJANG
62				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	100,00%	MENUNJANG
63				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	100,00%	MENUNJANG
64				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	100,00%	MENUNJANG
65				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok	0,00%	TIDAK MENUNJANG

				oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	masyarakat yang dibina dan diawasi		
66				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	100,00%	MENUNJANG
67				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	100,00%	MENUNJANG
68				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	100,00%	MENUNJANG
69	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	55,74%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	94,12%	MENUNJANG
70				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	83,33%	MENUNJANG
71				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	87,50%	MENUNJANG
72				Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	100,00%	MENUNJANG
73				Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	100,00%	MENUNJANG
74				Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan	100,00%	MENUNJANG
75				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	0,00%	TIDAK MENUNJANG
76				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	100,00%	MENUNJANG

77				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	40,91%	MENUNJANG
78				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	100,00%	MENUNJANG
79				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	25,71%	MENUNJANG
80				Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	100,00%	MENUNJANG
81				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	100,00%	MENUNJANG

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Pamekasan sebagian besar menunjang semuanya,

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Rp33.487.139.869	Rp23.711.423.794	70,81%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota	Rp33.487.139.869	Rp23.711.423.794	70,81%
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp300.000.000	Rp268.459.950	89,49%
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp1.050.000.000	Rp605.515.000	57,67%
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp24.297.496.851	Rp17.032.582.839	70,10%
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp500.000.000	Rp476.575.250	95,32%
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp3.458.690.118	Rp2.163.690.188	62,56%
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp250.000.000	Rp237.464.000	94,99%
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp550.000.000	Rp498.067.000	90,56%

1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp360.410.900	Rp0	0,00%
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Rp150.000.000	Rp68.267.267	45,51%
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp2.320.542.000	Rp2.133.003.100	91,92%
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp250.000.000	Rp227.799.200	91,12%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp6.890.688.300	Rp6.456.143.000	93,69%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.890.688.300	Rp6.456.143.000	93,69%
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp1.406.745.300	Rp1.276.474.800	90,74%
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp100.000.000	Rp63.639.000	63,64%
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp100.000.000	Rp13.541.000	13,54%
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp100.000.000	Rp75.950.600	75,95%
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp100.000.000	Rp0	0,00%
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp5.083.943.000	Rp5.026.537.600	98,87%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp6.775.130.499	Rp2.569.573.000	37,93%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.775.130.499	Rp2.569.573.000	37,93%
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp5.250.000.000	Rp1.131.294.650	21,55%
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rp1.425.130.499	Rp1.356.582.350	95,19%
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Rp100.000.000	Rp81.696.000	81,70%

1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp103.186.894.800	Rp74.935.066.330	72,62%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp103.186.894.800	Rp74.935.066.330	72,62%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp102.986.894.833	Rp74.758.374.430	72,59%
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp199.999.967	Rp176.691.900	88,35%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp8.925.000.000	Rp4.774.874.365	53,50%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp8.925.000.000	Rp4.774.874.365	53,50%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp300.000.000	Rp201.621.700	67,21%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Rp8.625.000.000	Rp4.573.252.665	53,02%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp350.000.000	Rp91.145.900	26,04%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp200.000.000	Rp53.898.900	26,95%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp150.000.000	Rp53.898.900	35,93%
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rp50.000.000	Rp0	0,00%

1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp150.000.000	Rp37.247.000	24,83%
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp100.000.000	Rp30.190.000	30,19%
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp50.000.000	Rp7.057.000	14,11%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp105.852.500	Rp66.950.900	63,25%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp105.852.500	Rp66.950.900	63,25%
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp46.566.100	93,13%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.247.500	Rp4.533.500	86,39%
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4.800.000	Rp4.531.000	94,40%
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp45.805.000	Rp11.320.300	24,71%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp2.931.319.194	Rp2.721.240.402	92,83%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.931.319.194	Rp2.721.240.402	92,83%
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.931.319.194	Rp2.721.240.402	92,83%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp142.530.000	Rp97.965.162	68,73%
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp142.530.000	Rp97.965.162	68,73%
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp142.530.000	Rp97.965.162	68,73%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp1.974.086.218	Rp1.344.310.216	68,10%
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp361.318.750	Rp256.334.704	70,94%
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.760.000	Rp2.691.700	46,73%

1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp44.102.000	Rp32.990.800	74,81%
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp41.755.000	Rp16.892.100	40,46%
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp42.721.750	Rp38.454.400	90,01%
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp226.980.000	Rp165.305.704	72,83%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp623.182.600	Rp396.100.000	63,56%
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp330.093.500	Rp296.100.000	89,70%
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp118.123.500	Rp100.000.000	84,66%
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp174.965.600	Rp0	0,00%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp681.939.068	Rp537.230.414	78,78%
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp8.375.000	Rp6.905.000	82,45%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp117.664.068	Rp73.620.888	62,57%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp555.900.000	Rp456.704.526	82,16%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp307.645.800	Rp154.645.098	50,27%
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp153.906.800	Rp88.360.648	57,41%
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp43.789.000	Rp20.041.400	45,77%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp109.950.000	Rp46.243.050	42,06%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp1.257.499.626	Rp513.457.050	40,83%
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp499.999.626	Rp285.871.200	57,17%
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp99.999.918	Rp94.735.250	94,74%
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp99.999.930	Rp95.551.950	95,55%

1.04.02.2.01 .03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp99.999.918	Rp95.584.000	95,58%
1.04.02.2.01 .04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp99.999.930	Rp0	0,00%
1.04.02.2.01 .05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp99.999.930	Rp0	0,00%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp757.500.000	Rp227.585.850	30,04%
1.04.02.2.03 .01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp717.500.000	Rp210.000.000	29,27%
1.04.02.2.03 .06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp40.000.000	Rp17.585.850	43,96%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp11.759.920.000	Rp11.394.232.650	96,89%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp190.000.000	Rp180.121.000	94,80%
1.04.03.2.01 .02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp190.000.000	Rp180.121.000	94,80%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp350.000.000	Rp329.365.000	94,10%
1.04.03.2.02 .02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Rp350.000.000	Rp329.365.000	94,10%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp11.219.920.000	Rp10.884.746.650	97,01%
1.04.03.2.03 .02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp9.962.420.000	Rp9.952.136.850	99,90%
1.04.03.2.03 .4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp1.257.500.000	Rp932.609.800	74,16%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%

1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%
TOTAL		Rp226.178.561.006	Rp173.466.565.819	76,69%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59,95%	52,90%	88,24%	Rp226.178.561.006	Rp173.466.565.819	76,69%	11,55%
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%	95,35%	120,79%	Rp400.000.000	Rp241.629.300	60,41%	60,38%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/Laik Fungsi	60%	56,40%	94,00%	Rp44.125.000.000	Rp36.272.074.015	82,20%	11,80%
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,57%	92,43%	94,73%	Rp25.619.919.626	Rp24.540.703.700	95,79%	-1,06%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	42%	30,23%	71,98%	Rp103.726.894.800	Rp75.444.552.330	72,73%	-0,75%
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	56,53%	43,97%	77,78%	Rp33.487.139.869	Rp23.711.423.794	70,81%	6,97%
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	66,65%	37,15%	55,74%	Rp13.665.818.799	Rp9.025.716.000	66,05%	-10,31%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	85	83,95	98,76%	Rp5.153.787.912	Rp4.230.466.680	82,08%	16,68%

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Pada tabel diatas, pencapaian kinerja dan anggaran pada tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa dikategorikan cukup bagus dengan nilai capaian 88.24% pada Kinerjanya dan 76,69% pada anggarannya. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi kinerja yang tinggi karena capaian kinerjanya lebih besar daripada anggarannya. Ada beberapa indikator sasaran yang tingkat efisiensinya masih dikategorikan kurang seperti misalnya pada indikator sasaran Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dengan tingkat efisiensi sebesar -10,31%. Hal ini disebabkan tidak bisa dilaksanakannya kegiatan PAK pada waktu itu. Ada beberapa indikator sasaran lainnya yang dinilai kurang efisien yaitu cakupan ketersediaan rumah layak huni dan prosentase penurunan luasan kawasan kumuh.

Dari tabel diatas dapat kita lihat juga pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran yang tingkat efisiensinya tinggi yaitu sebesar 60,38%, dimana capaian kinerjanya 120,79% sedangkan capaian anggarannya 60,41%. Ada beberapa indikator sasaran lainnya yang kategori kinerjanya dinilai efektif yaitu pada indikator prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik Fungsi, dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan.

Tingkat efisiensi yang masih rendah akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke depannya untuk lebih mengoptimalkan kinerja di semua kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga tercapai kinerja yang efektif dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	80 %	62,22 %	77,78%	Rp33.487.139.869	Rp23.711.423.794	70,81%	6,97%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	11 SPAM	10 SPAM	90,91%	Rp33.487.139.869	Rp23.711.423.794	70,81%	20,10%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Rp300.000.000	Rp268.459.950	89,49%	10,51%
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11 Dusun	7 Dusun	63,64%	Rp1.050.000.000	Rp605.515.000	57,67%	5,97%
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	214 Desa	162 Desa	75,70%	Rp24.297.496.851	Rp17.032.582.839	70,10%	5,60%
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4 Desa	4 Desa	100,00%	Rp500.000.000	Rp476.575.250	95,32%	4,68%
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 KKM	1 KKM	100,00%	Rp3.458.690.118	Rp2.163.690.188	62,56%	37,44%
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2 unit	2 unit	100,00%	Rp250.000.000	Rp237.464.000	94,99%	5,01%
7	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5 Desa	5 Desa	100,00%	Rp550.000.000	Rp498.067.000	90,56%	9,44%
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	4 Desa	0 Desa	0,00%	Rp360.410.900	Rp0	0,00%	0,00%
9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	1 KKM	1 KKM	100,00%	Rp150.000.000	Rp68.267.267	45,51%	54,49%
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	12 Desa	12 Desa	100,00%	Rp2.320.542.000	Rp2.133.003.100	91,92%	8,08%

11	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 %	3 %	100,00%	Rp250.000.000	Rp227.799.200	91,12%	8,88%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	66,65 %	62,73 %	94,12%	Rp6.890.688.300	Rp6.456.143.000	93,69%	0,42%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 SPALD	5 SPALD	83,33%	Rp6.890.688.300	Rp6.456.143.000	93,69%	-10,36%
1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	8 Desa	7 Desa	87,50%	Rp1.406.745.300	Rp1.276.474.800	90,74%	-3,24%
2	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	35 SDM	35 SDM	100,00%	Rp100.000.000	Rp63.639.000	63,64%	36,36%
3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	32 Peserta	32 Peserta	100,00%	Rp100.000.000	Rp13.541.000	13,54%	86,46%
4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	12 SDM	12 SDM	100,00%	Rp100.000.000	Rp75.950.600	75,95%	24,05%
5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Desa	0 Desa	0,00%	Rp100.000.000	Rp0	0,00%	0,00%
6	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	9 Desa	9 Desa	100,00%	Rp5.083.943.000	Rp5.026.537.600	98,87%	1,13%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	50,75 %	20,76 %	40,91%	Rp6.775.130.499	Rp2.569.573.000	37,93%	2,98%
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	100,00%	Rp6.775.130.499	Rp2.569.573.000	37,93%	62,07%
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	35 Desa	9 Desa	25,71%	Rp5.250.000.000	Rp1.131.294.650	21,55%	4,17%

2	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	9 Desa	9 Desa	100,00%	Rp1.425.130.499	Rp1.356.582.350	95,19%	4,81%
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Rp100.000.000	Rp81.696.000	81,70%	18,30%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	70 %	50,38 %	71,97%	Rp103.186.894.800	Rp74.935.066.330	72,62%	-0,65%
4	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Infrastruktur	2 Infrastruktur	100,00%	Rp103.186.894.800	Rp74.935.066.330	72,62%	27,38%
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	658 Unit	473 Unit	71,88%	Rp102.986.894.833	Rp74.758.374.430	72,59%	-0,71%
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	100,00%	Rp199.999.967	Rp176.691.900	88,35%	11,65%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28 %	26 %	92,86%	Rp8.925.000.000	Rp4.774.874.365	53,50%	39,36%
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100,00%	Rp8.925.000.000	Rp4.774.874.365	53,50%	46,50%
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Unit	244 Unit	122,00%	Rp300.000.000	Rp201.621.700	67,21%	54,79%

2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	11 Unit	100,00%	Rp8.625.000.000	Rp4.573.252.665	53,02%	46,98%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	39 %	36,58 %	93,80%	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%	3,88%
6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	100,00%	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%	10,08%
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	242 Unit	227 Unit	93,80%	Rp35.150.000.000	Rp31.607.675.450	89,92%	3,88%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	24 %	24,21 %	100,86%	Rp425.000.000	Rp91.145.900	21,45%	79,41%
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Penyeleng gara an	2 Penyeleng garaan	100,00%	Rp275.000.000	Rp53.898.900	19,60%	80,40%
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	130 Orang	130,00%	Rp200.000.000	Rp53.898.900	26,95%	103,05%
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	130 Orang	130,00%	Rp75.000.000	Rp0	0,00%	130,00%
8	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	28,57 %	17,71 %	62,00%	Rp150.000.000	Rp37.247.000	24,83%	37,17%
1	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	70 Orang	70,00%	Rp100.000.000	Rp30.190.000	30,19%	39,81%
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 Badan Usaha	23 Badan Usaha	46,00%	Rp50.000.000	Rp7.057.000	14,11%	31,89%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	96,04 %	28,46 %	29,63%	Rp1.257.499.626	Rp513.457.050	40,83%	-11,20%
9	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Pendataan	3 Pendataan	60,00%	Rp499.999.626	Rp285.871.200	57,17%	2,83%

1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100,00%	Rp99.999.918	Rp94.735.250	94,74%	5,26%
2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100,00%	Rp99.999.930	Rp95.551.950	95,55%	4,45%
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100,00%	Rp99.999.918	Rp95.584.000	95,58%	4,42%
4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	2 Kecamatan	0 Kecamatan	0,00%	Rp99.999.930	Rp0	0,00%	0,00%
5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kecamatan	0 Kecamatan	0,00%	Rp99.999.930	Rp0	0,00%	0,00%
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40,39 %	11,82 %	29,27%	Rp757.500.000	Rp227.585.850	30,04%	-0,78%
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	41 Unit	12 Unit	29,27%	Rp717.500.000	Rp210.000.000	29,27%	0,00%
2	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	40 Unit	12 Unit	30,00%	Rp40.000.000	Rp17.585.850	43,96%	-13,96%
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	92 %		0,00%	Rp11.759.920.000	Rp11.394.232.650	96,89%	-96,89%
11	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50 %		0,00%	Rp190.000.000	Rp180.121.000	94,80%	-94,80%
1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen		0,00%	Rp190.000.000	Rp180.121.000	94,80%	-94,80%
12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 kawasan	1 kawasan	100,00%	Rp350.000.000	Rp329.365.000	94,10%	5,90%

1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Rp350.000.000	Rp329.365.000	94,10%	5,90%
13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 Peningkatan Kualitas	2 Peningkatan Kualitas	100,00%	Rp11.219.920.000	Rp10.884.746.650	97,01%	2,99%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	270 Unit	270 Unit	100,00%	Rp9.962.420.000	Rp9.952.136.850	99,90%	0,10%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Koordinasi	3 Koordinasi	100,00%	Rp1.257.500.000	Rp932.609.800	74,16%	25,84%
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	96,04 %	95,91 %	99,87%	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%	-0,13%
14	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	100,00%	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%	0,00%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	751 Unit	750 Unit	99,87%	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	100,00%	-0,13%
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	66,66 %	33,33 %	50,00%	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%	9,99%
15	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44,44 %	22,22 %	50,00%	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%	9,99%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 PSU	1 PSU	50,00%	Rp100.000.000	Rp40.007.600	40,01%	9,99%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dapat dianalisa bahwa rata-rata perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan anggarannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tingkat efisiensinya yang cukup tinggi. Pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, capaian kinerjanya sama dengan capaian anggarannya sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 0%. Hal ini menunjukkan kinerja yang ideal dimana capaian kinerjanya berbanding lurus dengan capaian pada anggarannya.

Selain itu masih ada beberapa sub kegiatan yang masih memiliki tingkat efisiensi yang tergolong rendah namun masih berada pada rate -1% s/d -10% dimana hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring kami untuk diupayakan kembali secara maksimal di tahun berikutnya agar kinerja seluruh kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa berjalan efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman terdiri dari satu Indikator Kinerja yaitu Rasio Permukiman Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 88,24% (Kategori Cukup)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart terdiri dari dua indikator kinerja yaitu :
 - Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung, dengan capaian kinerja sebesar 120,79% (Sangat Baik)
 - Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, dengan capaian kinerja sebesar 94,00% (kategori Cukup)

- Sasaran Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni, dengan capaian kinerja sebesar 94,73% (Kategori Cukup)
 - Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan capaian kinerja sebesar 71,98% (Kategori Kurang)
 - Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, dengan capaian kinerja sebesar 77,78% (Kategori Kurang)
 - Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, dengan capaian kinerja sebesar 55,74% (Kategori Kurang)
- Sasaran Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah terdiri dari indikator kinerja Nilai SAKIP, dengan capaian Nilai A (83,95) atau capaian kinerjanya sebesar 98,76% (kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, maka secara umum pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp226.178.561.006 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp173.466.565.819, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 76,69% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,54%,

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan ke depannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja tahun 2022 secara umumnya termasuk dalam kategori cukup baik sehingga diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan

dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

- Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
- Kegiatan yang belum tercapai di tahun 2022 baik fisik maupun anggaran yang belum terserap semuanya akan diatasi dengan melakukan pengecekan dan mengidentifikasi permasalahannya serta menyusun anggarannya pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST
NIP. 19680330 199803 1 006
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

➤ MATRIKS RENSTRA 2018-2023 DAN PERUBAHANNYA

T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEBELUM PERUBAHAN																			
			Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP		100%	Rp1.055.530.000	100%	Rp1.240.337.021									DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	Rp476.530.000	100%	Rp616.337.021							100%	Rp1.092.867.021	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.01.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	60 Kali	60 Kali	Rp117.555.000	30 Kali	Rp77.562.021							90 Kali	Rp195.117.021	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	6 Pelayan	6 Pelayan	Rp358.975.000	6 Pelayan	Rp538.775.000							12 Pelayan	Rp897.750.000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	● Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi		100%	Rp293.000.000	100%	Rp435.000.000							100%	Rp728.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

				• Prosentase Aparatur Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	87,50%	Rp90.000.000	87,50 %	Rp125.000.000						87,50 %	Rp215.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	6 Ruang	1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	Rp95.000.000	Rp90.000.000					1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	Rp185.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	5 Unit	20 Unit X triwulan	5 Unit	Rp124.000.000	Rp120.000.000					5 Unit	Rp244.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	85 Unit	85 Unit	225 Unit	Rp24.500.000	Rp25.000.000					310 Unit	Rp49.500.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	31 Unit	8 Unit	138 Unit	Rp49.500.000	Rp200.000.000					146 Unit	Rp249.500.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	-	-	-	Rp0	Rp0					-	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	32 Orang	32 Orang	33 Orang	Rp90.000.000	Rp125.000.000					33 Orang	Rp215.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100%	100%	Rp196.000.000	100%	Rp64.000.000						100%	Rp260.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp171.000.000	4 Dokumen	Rp27.000.000						4 Dokumen	Rp198.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan kualitas baik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp37.000.000						1 Dokumen	Rp62.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.03	Pengumpulan / Updating Data Kebutuhan Perencanaan	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan yang disusun		n/a	Rp0	n/a	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman				Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman	59,11 %	59,31%	Rp3.433.280.000	59,52 %	Rp3.148.838.000						59,52 %	Rp6.582.118.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standar				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,12 %	95,33%	Rp659.280.000	97,17 %	Rp698.466.000						97,17 %	Rp1.357.746.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung		1,05%	Rp264.000.000	1,15%	Rp200.000.000						1,15%	Rp464.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi		22,00%	Rp2.510.000.000	24%	Rp2.350.860.000						24%	Rp4.860.860.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni	95,12 %	95,33%	Rp659.280.000	95,57 %	Rp698.466.000						95,57 %	Rp1.357.746.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.04.01.07.01	Validasi Database Rumah Tidak Layak Huni Perdesaan	Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi studi data base rumah tidak layak huni perdesaan	6 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp250.000.000	n/a	Rp0							2 Kecamatan	Rp250.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.02	Koordinasi dan perencanaan peningkatan kualitas perumahan swadaya melalui DAK	Jumlah lokasi yang mendapatkan infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi		175 Unit	Rp140.593.000	130 Unit	Rp100.488.000							305 Unit	Rp241.081.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.03	Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya		416 Unit	Rp106.055.000	50 Unit	Rp30.000.000							466 Unit	Rp136.055.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.04	Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah yang Dibangun		n/a	Rp0	n/a	Rp0							n/a	Rp0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.05	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki		7 Unit	Rp120.000.000	n/a	Rp0							7 Unit	Rp120.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.06	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang di perbaiki		n/a	Rp0	464 Unit	Rp446.878.000							464 Unit	Rp446.878.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.07.08	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Perumahan Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan		1 Aplikasi	Rp100.000.000	1 Aplikasi	Rp45.000.000							2 Aplikasi	Rp145.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.07.09	Koordinasi dan Perencanaan Penunjang Rehabilitasi Rumah Swadaya	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi	462 Unit	175 Unit	Rp83.225.000	130 Unit	Rp76.100.000						305 Unit	Rp159.325.000		Kabupaten Pamekasan
	Penyehatan lingkungan permukiman			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		97,48%	Rp85.435.000.000	84,03 %	Rp123.503.752.700						84,03 %	Rp208.938.752.700	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan		53,53%	Rp10.283.070.600	54,53 %	Rp34.201.788.750						54,53 %	Rp44.484.859.350	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan		63,65%	Rp2.470.000.000	64,65 %	Rp7.812.004.800						64,65 %	Rp10.282.004.800	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani	82,00 %	82,00%	Rp31.630.000.000	85,00 %	Rp210.000.000						85,00 %	Rp31.840.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani		46,25%	Rp25.420.000.000	47,75 %	Rp9.831.647.600						47,75 %	Rp35.251.647.600	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Pondok pesantren yang tertangani		37,38%	Rp22.785.000.000	38,00 %	Rp33.162.574.900						38,00 %	Rp55.947.574.900	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Kawasan Perdesaan yang tertangani		35,38%	Rp5.600.000.000	5 Kawasan	Rp80.299.530.200						5 Kawasan	Rp85.899.530.200	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.04.01.08.01	Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya		7 Unit	Rp750.00 0.000	0	Rp0						7 Unit	Rp750.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.02	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Pondok Pesantren	Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Pondok Pesantren yang dibangun / direhabilitasi		134 Unit	Rp22.785. 000.000	208 Unit	Rp33.16 2.574.90 0						342 Unit	Rp55.94 7.574.90 0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.03	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana Wilayah Permukiman Perkotaan yang mendapat perbaikan lingkungan		240 Unit	Rp25.220. 000.000	67 Unit	Rp9.331. 647.600						307 Unit	Rp34.55 1.647.60 0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.04	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan RUPANANDUR	Jumlah sarana dan Prasarana Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan		70 Unit	Rp18.600. 000.000	0	Rp0						70 Unit	Rp18.60 0.000.00 0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.05	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang dibangun		5 Unit	Rp1.100.0 00.000	0	Rp0						5 Unit	Rp1.100. 000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.06	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan yang dikembangkan		77 Unit	Rp9.580.0 00.000	0	Rp0						77 Unit	Rp9.580. 000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.07	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah sarana dan prasarana kawasan pesisir yang dibangun		9 Unit	Rp1.600.0 00.000	0	Rp0						9 Unit	Rp1.600. 000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.08	Normalisasi Saluran Permukiman Kawasan Perkotaan	Jumlah saluran permukiman kawasan perkotaan yang di normalisasi		10 Unit	Rp200.00 0.000	5 Unit	Rp500.0 00.000						15 Unit	Rp700.0 00.000		Kabupaten Pamekasan

	1.04.01.08.09	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani (Kawasan Minapolitan, Rupanandur, Kampung Batik, Kawasan Bagi Rasa, Kawasan Kumuh di perdesaan)		22 unit	Rp5.600.000.000	446 Unit	Rp74.099.530.200						468 Unit	Rp79.699.530.200		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.10	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan		-	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (DID Tambahan Tahap III)	Jumlah infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani		-	Rp0	40 Unit	Rp6.200.000.000						40 Unit	Rp6.200.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.08.36	Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah dokumen identifikasi Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang disusun		-	Rp0	2 dokumen	Rp210.000.000						2 dokumen	Rp210.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.09	Program Penataan bangunan dan lingkungan	Prosentase penyelenggaraan bangunan gedung	20%	22%	Rp2.674.000.000	24%	Rp2.450.000.000						24%	Rp5.124.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.09.01	Koordinasi Penyelenggara n Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung yang	2.612 Unit	300 Unit	Rp264.000.000	150 Unit	Rp200.000.000						450 Unit	Rp464.000.000		Kabupaten Pamekasan

			dikoordinasikan														
	1.04.01 .09.02	Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang dibangun	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.03	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang disusun		4 Doku men	Rp2.310.0 00.000	1 Doku men	Rp300.0 00.000						5 Doku men		Rp2.610. 000.000	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.04	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang dibangun	12 Unit	1 Unit	Rp100.00 0.000	9 Unit	Rp1.700. 000.000						10 Unit		Rp1.800. 000.000	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.06	Penyusunan Dokumen RTBL	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) yang disusun	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.07	Rehab Gedung Kantor/Instansi Pemerintah daerah	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang direhab	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.10	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .09.11	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Kabupaten	Jumlah bangunan fasilitas umum kabupaten yang di bangun / yang direhabilitasi	0	0	Rp0	1 Doku men	Rp250.0 00.000						1 Doku men		Rp250.0 00.000	Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum		53,53%	Rp10.283.070.600	54,53 %	Rp34.201.788.750						54,53 %	Rp44.484.859.350	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi	2,2%	63,65%	Rp2.470.000.000	64,65 %	Rp7.812.004.800						64,65 %	Rp10.282.004.800	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.01	Penyediaan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih		70 Unit	Rp9.676.280.000	0	Rp0						70 Unit	Rp9.676.280.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.02	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah lokasi penerima bantuan PAMSIMAS	14 Unit	14 Unit	Rp100.000.000	12 Unit	Rp35.000.000						26 Unit	Rp135.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.03	Pipanisasi / Air Bersih / Air Minum	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum		2 Unit	Rp200.000.000	0	Rp0						2 Unit	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.04	Koordinasi dan Penyelenggara n Air Minum dan Sanitasi	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang terkoordinasi	1 Unit	0	Rp0	1 Doku men	Rp150.000.000						1 Doku men	Rp150.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.05	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi		1 Unit	Rp600.000.000	0	Rp0						1 Unit	Rp600.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.06	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Reguler)	Jumlah sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan		2 Unit	Rp1.870.718.000	0	Rp0						2 Unit	Rp1.870.718.000		Kabupaten Pamekasan

	1.04.01 .10.07	Pembangunan Prasarana Sanitasi / Saluran Pembuang	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi		7 Unit	Rp2.470.000.000	20 Unit	Rp3.288.756.800						27 Unit	Rp5.758.756.800		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.08	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan SPAM dan Sanitasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.000	2 dokumen	Rp200.000.000						3 dokumen	Rp300.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.09	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah saluran pembuang / MCK yang dibangun / yang direhabilitasi		16 Unit	Rp6.300.000.000	180 Unit	Rp1.419.198.000						196 Unit	Rp7.719.198.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.10	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Penugasan)	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi air minum / air bersih		4 Unit	Rp700.000.000	7 Unit	Rp1.000.112.000						11 Unit	Rp1.700.112.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.12	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah lokasi penerima bantuan air minum dan sanitasi		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.13	Pembangunan/ Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perkotaan		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01 .10.14	Pembangunan/ Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perdesaan		0	Rp0	280 Unit	Rp32.966.676.750						280 Unit	Rp32.966.676.750		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01 .10.17	Pembangunan IPAL Kombinasi MCK	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan IPAL Kombinasi MCK		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.19	Pembangunan MCK ++ / MCK Pondok Pesantren	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan MCK++ Pondok Pesantren		0	Rp0	11 Unit	Rp1.754. 050.000						11 Unit	Rp1.754. 050.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.24	Pengeboran Air Minum/Air Bersih	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.26	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM yang dibina		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.29	Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik	Jumlah dokumen lokasi titik air yang ditentukan melalui Geolistrik	1 unit	1 Doku men	Rp100.00 0.000	0	Rp0						1 Doku men	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.32	Penyusunan Perencanaan Teknis Sanitasi Lingkungan Permukiman	Jumlah Kecamatan yang mendapat Validasi studi data base sanitasi yang disusun		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.33	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual		0	Rp0	170 Unit	Rp1.200. 000.000						170 Unit	Rp1.200. 000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .10.52	Optimalisasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih		1 Unit	Rp106.79 0.600	0	Rp0							Rp106.7 90.600		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.10.53	Optimalisasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Optimalisasi DAK PAK)	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih	1 Unit	Rp58.725.700	0	Rp0								Rp58.725.700		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.11	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	Prosentase tenaga terampil yang bersertifikat di bidang Jasa Konstruksi	24%	Rp100.000.000	24%	Rp100.860.000						24%		Rp200.860.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.11.01	Sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi	jumlah tenaga terampil yang kompeten di bidang jasa konstruksi	30 orang	Rp50.000.000	70 orang	Rp100.860.000						100 orang		Rp150.860.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.11.02	Monitoring dan evaluasi rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	jumlah badan usaha yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin usaha jasa konstruksi	100 badan usaha	Rp50.000.000	0	Rp0						100 badan usaha		Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.11.03	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Jasa Konstruksi Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan			0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan
SETELAH PERUBAHAN																		
										Rp207.038.154.050		Rp226.178.561.006		Rp82.653.127.480		Rp515.869.842.536		Kabupaten Pamekasan
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP					A	Rp3.427.392.578	A	Rp5.153.787.912	A	Rp4.835.264.505	A	Rp13.416.444.995	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					100%	Rp97.144.000	100%	Rp105.852.500	100%	Rp97.047.500	100%	Rp300.044.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas					4 Perencanaan	Rp97.144.000	4 Perencanaan	Rp105.852.500	4 Perencanaan	Rp97.047.500	4 Perencanaan	Rp300.044.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun					2 Dokumen	Rp25.000.000	2 Dokumen	Rp25.000.000	3 Dokumen	Rp50.000.000	2 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan					1 Dokumen Data	Rp25.000.000	1 Dokumen Data	Rp25.000.000			2 Dokumen Data	Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan					40 Dokumen	Rp5.247.500	62 Dokumen	Rp5.247.500	75 Dokumen	Rp5.247.500	57 Dokumen	Rp15.742.500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan					18 dokumen	Rp4.800.000	22 dokumen	Rp4.800.000	24 dokumen	Rp4.800.000	66 dokumen	Rp14.400.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan					3 dokumen	Rp37.096.500	3 dokumen	Rp45.805.000	3 dokumen	Rp37.000.000	3 dokumen	Rp119.901.500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik					100%	Rp1.859.061.952	100%	Rp2.931.319.194	100%	Rp3.093.906.532	100%	Rp7.884.287.678	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik						1 Unit Kerja	Rp1.859.061.952	1 Unit Kerja	Rp2.931.319.194	1 Unit Kerja	Rp3.093.906.532	1 Unit Kerja	Rp7.884.287.678	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan						14 Bulan	Rp1.859.061.952	14 Bulan	Rp2.931.319.194	53 Orang / Bulan	Rp3.093.906.532	14 Bulan	Rp7.884.287.678		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur						80%	Rp148.980.000	80%	Rp142.530.000	80%	Rp175.000.000	80%	Rp466.510.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi						53 Aparatur	Rp148.980.000	53 Aparatur	Rp142.530.000	53 Aparatur	Rp175.000.000	53 Aparatur	Rp466.510.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi						53 Aparatur	Rp148.980.000	53 Aparatur	Rp142.530.000	53 Orang	Rp175.000.000	53 Aparatur	Rp466.510.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi						100%	Rp1.322.206.626	100%	Rp1.974.086.218	100%	Rp1.469.310.473	100%	Rp4.765.603.317	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi						6 Sarana	Rp268.060.850	5 Sarana	Rp361.318.750	6 Sarana	Rp373.447.969	6 Sarana	Rp1.002.827.569	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						12 komponen	Rp5.760.000	12 komponen	Rp5.760.000	12 Paket	Rp5.760.000	36 komponen	Rp17.280.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					55 Peralatan Kantor	Rp28.000.000	51 Peralatan Kantor	Rp44.102.000	72 Paket	Rp41.011.969	165 Peralatan Kantor	Rp113.113.969		Kabupaten Pamekasan
				Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia					17 Alat Kebersihan	Rp6.442.100	16 Alat Kebersihan				51 Alat Kebersihan	Rp6.442.100		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					12 bulan	Rp45.340.000	12 bulan	Rp41.755.000	89 Paket	Rp39.700.000	12 bulan	Rp126.795.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan					6 Barang	Rp37.868.750	7 Barang	Rp42.721.750	7 Paket	Rp40.000.000	18 Barang	Rp120.590.500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					80 Kali	Rp144.650.000	80 Kali	Rp226.980.000	80 Laporan	Rp246.976.000	240 Kali	Rp618.606.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi					1 Prasarana	Rp325.269.700	3 Prasarana	Rp623.182.600	1 Prasarana	Rp150.000.000	1 Prasarana	Rp1.098.452.300	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan							1 Kendaraan	Rp330.093.500		Rp0	1 Kendaraan	Rp330.093.500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan							5 Kendaraan	Rp118.123.500		Rp0	5 Kendaraan	Rp118.123.500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi					98 unit	Rp325.269.700	27 unit	Rp174.965.600	15 unit	Rp150.000.000	144 Unit	Rp650.235.300		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan						3 Jasa Penunjang	Rp517.727.640	3 Jasa Penunjang	Rp681.939.068	3 Jasa Penunjang	Rp642.107.904	3 Jasa Penunjang	Rp1.841.774.612	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan						2 Jasa Layanan	Rp4.125.000	2 Jasa Layanan	Rp8.375.000	2 Laporan	Rp8.375.000	2 Jasa Layanan	Rp20.875.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan						6 Jasa Layanan	Rp76.352.640	6 Jasa Layanan	Rp117.664.068	217 Laporan	Rp77.832.904	6 Jasa Layanan	Rp271.849.612		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						11 Jasa Layanan	Rp437.250.000	11 Jasa Layanan	Rp555.900.000	30 Laporan	Rp555.900.000	11 Jasa Layanan	Rp1.549.050.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah						3 Pemeliharaan	Rp211.148.436	3 Pemeliharaan	Rp307.645.800	3 Pemeliharaan	Rp303.754.600	3 Pemeliharaan	Rp822.548.836	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan						5 Kendaraan	Rp128.263.436	5 Kendaraan	Rp153.906.800	5 Unit	Rp150.000.000	5 Kendaraan	Rp432.170.236		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola						147 unit	Rp28.815.000	148 unit	Rp43.789.000	148 Unit	Rp28.789.000	443 unit	Rp101.393.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi						1 Gedung Kantor	Rp35.000.000	19 Ruang	Rp109.950.000	19 Unit	Rp124.965.600	19 Ruang	Rp269.915.600		Kabupaten Pamekasan
				Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara /						1 Rumah	Rp19.070.000						Rp19.070.000		Kabupaten Pamekasan

				direhabilitasi					Dinas									
			Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni												Rp0		Kabupaten Pamekasan
			Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan					55,53 %	Rp44.60 4.474.061	56,53 %	Rp33.48 7.139.869	57,53 %	Rp19.37 9.952.900	57,53 %	Rp97.47 1.566.830	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM					80%	Rp44.60 4.474.061	80%	Rp33.48 7.139.869	80 %	Rp19.37 9.952.900	80 %	Rp97.47 1.566.830	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan					7 SPAM	Rp44.60 4.474.061	11 SPAM	Rp33.48 7.139.869	12 SPAM	Rp19.37 9.952.900	7 SPAM	Rp97.47 1.566.830	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun					2 dokumen	Rp199.999.726	2 dokumen	Rp300.000.000	3 Dokumen	Rp300.000.000	2 dokumen	Rp799.999.726		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun							11 desa/ kel	Rp1.050.000.000	12 Liter/ Detik	Rp650.000.000	20 desa/ kel	Rp1.700.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan					311 Dusun	Rp37.024.999.851	214 Dusun	Rp24.297.496.851	7800 SR	Rp9.950.000.000	309 Dusun	Rp71.272.496.702		Kabupaten Pamekasan

		1.03.03.201.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan							4 Desa	Rp500.000.000	8 Liter/ Detik	Rp500.000.000	20 desa/kel	Rp1.000.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya					1 Desa	Rp2.642.750.874	1 Desa	Rp3.458.690.118	1 Desa	Rp2.499.000.000	3 Desa	Rp8.600.440.992		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas							2 Desa	Rp250.000.000	160 SR	Rp500.000.000	20 desa/kel	Rp750.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki					10 Desa	Rp1.100.000.939	5 Desa	Rp550.000.000	5 Desa	Rp550.000.000	20 Desa	Rp2.200.000.939		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi					5 KKM	Rp1.494.999.900	4 KKM	Rp360.410.900	5 Kelom pok Masya rakat	Rp1.360.410.900	42 KKM	Rp3.215.821.700		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi					1 unit	Rp50.000.000	1 unit	Rp150.000.000	1 Unit	Rp150.000.000	3 unit	Rp350.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara							1 kegiatan	Rp0	1 Unit	Rp100.000.000	2 paket	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan					10 Desa	Rp2.091.722.771	12 Desa	Rp2.320.542.000	20 Desa	Rp2.320.542.000	12 Desa	Rp6.732.806.771		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki							3 desa/ kel	Rp250.000.000	4 Unit	Rp500.000.000	20 desa/ kel	Rp750.000.000		Kabupaten Pamekasan
Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan					65,65 %	Rp22.462.778.999	66,65 %	Rp13.665.818.799	67,65 %	Rp10.219.107.199	67,65 %	Rp46.347.704.997	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan					65,65 %	Rp17.537.779.000	66,65 %	Rp6.890.688.300	67,65 %	Rp7.493.976.700	67,65 %	Rp31.922.444.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan					2 SPAL	Rp17.537.779.000	6 SPAL	Rp6.890.688.300	13 SPAL	Rp7.493.976.700	2 SPAL	Rp31.922.444.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun									1 Dokumen	Rp250.000.000	1 dokumen	Rp250.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan					19 Desa	Rp3.136.650.000	8 Desa	Rp1.406.745.300	15 Rumah Tangga	Rp560.033.700	25 Desa	Rp5.103.429.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina							35 SDM	Rp100.000.000	13 Orang	Rp100.000.000	10 lokasi	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik							32 Peserta	Rp100.000.000	17 Kelompok	Rp100.000.000	3 bln	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan							12 SDM	Rp100.000.000	13 Orang	Rp100.000.000	10 Pengelola	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara							2 Desa	Rp100.000.000	2 Unit	Rp100.000.000	2 Paket	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan							1 Kegiatan	Rp0	1 Dokumen	Rp200.000.000	2 Paket	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.05 .2.01.1 2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun					30 Desa	Rp14.40 1.129.000	9 Desa	Rp5.083. 943.000	500 Ruma h Tangg a	Rp5.083. 943.000	30 Desa	Rp24.56 9.015.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan							0		1 Unit	Rp300.0 00.000	1 unit	Rp300.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang disediakan							0		40 Ruma h Tangg a	Rp100.0 00.000	2 orang	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 5	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun							1 unit	Rp0	1 M3/H ari	Rp100.0 00.000	2 unit	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 6	Rehabilitasi/Pen ingkatan/Perlua san Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang direhabilitasi/diti ngkatkan							0		1 M3/H ari	Rp200.0 00.000	1 unit	Rp200.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 7	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pe rluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Pembangunan/Re habilitasi/ Peningkatan/Perl uasan Sarana dan Prasarana IPLT yang dilakukan							0		1 Doku men	Rp300.0 00.000	1 doku men	Rp300.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan					49,25 %	Rp4.924. 999.999	50,75 %	Rp6.775. 130.499	52,25 %	Rp2.725 .130.499	52,25 %	Rp14.42 5.260.997	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan						1 Sistem Drainase	Rp4.924.999.999	3 Sistem Drainase	Rp6.775.130.499	3 Sistem Drainase	Rp2.725.130.499	1 Sistem Drainase	Rp14.425.260.997	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun								35 Desa	Rp5.250.000.000	1200 M	Rp1.200.000.000	2 Desa	Rp6.450.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi						35 Desa	Rp4.924.999.999	9 Desa	Rp1.425.130.499	1350 M	Rp1.425.130.499	39 Desa	Rp7.775.260.997		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun								1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh						63,03 %	Rp84.864.474.380	42%	Rp103.726.894.800	21%	Rp16.050.000.000	21%	Rp204.641.369.180	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan						60%	Rp84.514.474.480	70%	Rp103.186.894.800	80 %	Rp15.200.000.000	80 %	Rp202.901.369.280	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan						1 Infrastruktur	Rp84.514.474.480	2 Infrastruktur	Rp103.186.894.800	1 Infrastruktur	Rp15.200.000.000	1 Infrastruktur	Rp202.901.369.280	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan						550 Unit	Rp84.514.474.480	658 Unit	Rp102.986.894.833	97 Sistem Jaringan	Rp15.000.000.000	983 Unit	Rp202.501.369.313		Kabupaten Pamekasan
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan								2 unit	Rp199.999.967	2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000	4 unit	Rp299.999.967		Kabupaten Pamekasan
	1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan								2 Dokumen	Rp0	2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000	4 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani						89%	Rp349.999.900	92 %	Rp540.000.000	94 %	Rp850.000.000	94 %	Rp1.739.999.900	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan							Rp0	50%	Rp190.000.000	100%	Rp400.000.000		Rp590.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								1 Paket	Rp0	1 Dokumen	Rp100.000.000	2 paket	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan

			Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan													
		1.04.03 .2.02.0 1.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun						1 Doku men	Rp190.00 0.000	3 Doku men	Rp200.0 00.000	4 Doku men	Rp390.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan						1 Paket	Rp0	1 Lapor an	Rp100.0 00.000	2 paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya				1 Kawa san	Rp349.9 99.900	1 Kawa san	Rp350.0 00.000	1 Kawas an	Rp450.0 00.000	1 Kawas an	Rp1.149. 999.900	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02.0 1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan							Rp0				Rp0		Kabupaten Pamekasan

	1.04.03 .2.02.0 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun					3 Doku men	Rp349.9 99.900	3 Doku men	Rp350.00 0.000	3 Doku men	Rp350.0 00.000	9 Doku men	Rp1.049. 999.900		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03 .2.02.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan								Rp0	1 Lapor an	Rp100.0 00.000	1 Paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni					97,37 %	Rp15.12 3.234.750	97,57 %	Rp25.61 9.919.626	97,77 %	Rp14.54 2.420.00 0	97,77 %	Rp55.28 5.574.376	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani					89,00 %	Rp2.488. 234.750	92,00 %	Rp11.21 9.920.000	94,00 %	Rp6.512 .420.000	94 %	Rp20.22 0.574.750	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03 .2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya					2 Penin gkata n Kualit as	Rp2.488. 234.750	2 Penin gkata n Kualit as	Rp11.21 9.920.000	3 Penin gkata n Kualit as	Rp6.512 .420.000	2 Penin gkatan Kualit as	Rp20.22 0.574.750	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh yang disusun								Rp0	3 Dokumen	Rp100.000.000	3 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki					61 Unit	Rp1.275.260.000	270 Unit	Rp9.962.420.000	270 Unit Rumah	Rp5.662.420.000	446 Unit	Rp16.900.100.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan					3 Koordinasi	Rp1.212.974.750	3 Koordinasi	Rp1.257.500.000	3 Laporan	Rp750.000.000	9 Koordinasi	Rp3.220.474.750		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang terkena program peremajaan permukiman kumuh yang menerima bantuan uang sewa rumah Tinggal sementara								Rp0	10 Laporan	Rp0	10 KK	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang telah terbangun								Rp0	Ha	Rp0	10 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.03.203.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara n Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun								Rp0	3 Doku men	Rp0	3 Doku men	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh					95,80 %	Rp12.63 5.000.000	96,04 %	Rp13.14 2.500.000	96,27 %	Rp6.105 .000.000	96,27%	Rp31.88 2.500.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.04.201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan					1 Perbai kan RTLH	Rp12.63 5.000.000	1 Perbai kan RTLH	Rp13.14 2.500.000	1 Perbai kan RTLH	Rp6.105 .000.000	1 Perbai kan RTLH	Rp31.88 2.500.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.04.201.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki					722 Unit	Rp12.63 5.000.000	751 Unit	Rp13.142 .500.000	348 Unit Ruma h	Rp6.105 .000.000	2473 Unit	Rp31.88 2.500.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni						Rp0	96,04 %	Rp1.257. 499.626	96,27 %	Rp1.925 .000.000	96,27 %	Rp3.182. 499.626	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.04.02 .2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan						0	5 Penda taan	Rp499.9 99.626	6 Penda taan	Rp200.0 00.000	6 Penda taan	Rp699.9 99.626	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.01.0 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi							2 Keca matan	Rp99.999 .918	1 Doku men	Rp100.0 00.000	9 Kecam atan	Rp199.9 99.918		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.01.0 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi							2 Keca matan	Rp99.999 .930	Doku men	Rp0	9 Kecam atan	Rp99.99 9.930		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.01.0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan							2 Keca matan	Rp99.999 .918	1 Doku men	Rp100.0 00.000	9 Kecam atan	Rp199.9 99.918		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.01.0 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan							2 Keca matan	Rp99.999 .930	Doku men	Rp0	9 Kecam atan	Rp99.99 9.930		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.01.0 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan							2 Keca matan	Rp99.999 .930	Doku men	Rp0	9 Kecam atan	Rp99.99 9.930		Kabupaten Pamekasan

		1.04.02 .2.01.0 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan							2 Kecamatan	Rp0	Dokumen	Rp0	9 Kecamatan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan							40,39 %	Rp757.500.000	100%	Rp1.575.000.000	100%	Rp2.332.500.000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki							41 Unit	Rp717.500.000	50 Unit Rumah	Rp875.000.000	91 Unit	Rp1.592.500.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun							1 Dokumen	Rp0	Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan							1 Unit	Rp0	Ha	Rp0	2 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun							10 Unit	Rp0	10 Unit Rumah	Rp350.000.000	30 Unit	Rp350.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.02 .2.03.0 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun							10 Unit	Rp0	5 Unit Rumah	Rp350.000.000	30 Unit	Rp350.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara							40 Unit	Rp40.000.000	Unit Rumah	Rp0	90 Unit	Rp40.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan							25%	Rp0	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.06.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi							5 Izin	Rp0	1 Dokumen	Rp50.000.000	10 izin	Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.06.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan							5 Koordinasi	Rp0	5 Laporan	Rp50.000.000	10 Koordinasi	Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan							50%	Rp0	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.04.02.207.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikoordinasikan							100 Unit	Rp0	50 Laporan	Rp50.000.000	200 Unit	Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart		Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung					67,83 %	Rp255.900.000	78,94 %	Rp400.000.000	90,06 %	Rp400.000.000	90,06 %	Rp1.055.900.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata					26%	Rp200.000.000	28%	Rp300.000.000	30 %	Rp300.000.000	30 %	Rp800.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan					2 Penyelenggaraan	Rp200.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp300.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp300.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp800.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08.201.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan					200 Unit	Rp200.000.000	200 Unit	Rp300.000.000	200 Dokumen	Rp300.000.000	600 Unit	Rp800.000.000		Kabupaten Pamekasan

	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan						33,33 %	Rp55.90 0.000	66,66 %	Rp100.0 00.000	100 %	Rp100.0 00.000	100 %	Rp255.9 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU						11,11 %	Rp55.90 0.000	44,44 %	Rp100.0 00.000	77,77 %	Rp100.0 00.000	77,77 %	Rp255.9 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.05 .2.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab						1 PSU	Rp55.90 0.000	2 PSU	Rp100.00 0.000	3 Laporan	Rp100.0 00.000	6 PSU	Rp255.9 00.000		Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi						20%	Rp36.29 9.899.282	60 %	Rp44.12 5.000.000	80 %	Rp17.22 6.382.87 6	80 %	Rp97.65 1.282.158	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08 .2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan						2 Penyelenggaraan	Rp4.500. 459.932	2 Penyelenggaraan	Rp8.625. 000.000	2 Penyelenggaraan	Rp6.751. 382.876	2 Penyelenggaraan	Rp19.87 6.842.808	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08 .2.01.0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah						2 Dokumen	Rp100.0 00.000	3 Dokumen	Rp435.00 0.000	6 Dokumen	Rp6.751. 382.876	14 Dokumen	Rp7.286. 382.876		Kabupaten Pamekasan

			Kabupaten/Kota	daerah yang disusun														
				jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor					13 Sarpras	Rp2.100.000.000	6 Sarpras	Rp800.000.000		Rp0	20 Sarpras	Rp2.900.000.000		Kabupaten Pamekasan
				jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan					1 Gedung Kantor	Rp2.300.459.932	2 Gedung Kantor	Rp7.390.000.000		Rp0	5 Gedung Kantor	Rp9.690.459.932		Kabupaten Pamekasan
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata					38,5%	Rp31.549.439.350	39%	Rp35.150.000.000	40 %	Rp10.000.000.000	40 %	Rp76.699.439.350	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan					1 Penataan Bangunan	Rp31.549.439.350	1 Penataan Bangunan	Rp35.150.000.000	1 Penataan Bangunan	Rp10.000.000.000	2 Penataan Bangunan	Rp76.699.439.350	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata					200 Unit	Rp31.549.439.350	242 Unit	Rp35.150.000.000	200 Kawasan	Rp10.000.000.000	600 unit	Rp76.699.439.350		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi					24%	Rp250.000.000	24%	Rp350.000.000	24 %	Rp475.000.000	24 %	Rp1.075.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan					2 Penyelenggaraan	Rp200.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp200.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp275.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp675.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang					100 Orang	Rp150.000.000	100 Orang	Rp150.000.000	150 Orang	Rp200.000.000	350 Orang	Rp500.000.000		Kabupaten Pamekasan

			Terampil Konstruksi	dilaksanakan														
		1.03.11 .201.0 6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat					100 Orang	Rp50.00 0.000	100 Orang	Rp50.000 .000	150 Orang	Rp75.00 0.000	350 Orang	Rp175.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .203	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan					1 IUJK	Rp50.00 0.000	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp50.00 0.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .203.0 2	Dukungan/Fasil itasi Penyelenggaraa n Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi					100 Badan Usaha	Rp50.00 0.000	0	Rp0	0	Rp0	100 Badan Usaha	Rp50.00 0.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .204	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi							28,57 %	Rp150.0 00.000	57,14 %	Rp200.0 00.000	57,14 %	Rp350.0 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .204.0 1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun							1 Doku men	Rp0	1 Doku men	Rp25.00 0.000	2 Doku men	Rp25.00 0.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .204.0 2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi							100 Orang	Rp100.00 0.000	100 Orang	Rp100.0 00.000	200 Orang	Rp200.0 00.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.11 .2.04.0 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi									50 Badan Usaha Jasa Konstr uksi	Rp50.000 .000	100 Lapor an	Rp75.00 0.000	150 Badan Usaha Jasa Konstr uksi	Rp125.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021																				
															Rp184.1 94.690.5 85		Rp184.1 94.690.58 5		Kabupaten Pamekasan	
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP									A	Rp4.948 .227.922	A	Rp4.948. 227.922	DPRK P	Kabupaten Pamekasan		
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas									100%	Rp95.67 8.618	100%	Rp95.67 8.618	DPRK P	Kabupaten Pamekasan		
		1.04.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas									4 Perenc anaan	Rp95.67 8.618	4 Perenc anaan	Rp95.67 8.618	DPRK P	Kabupaten Pamekasan		
		1.04.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									3 DOKU MEN	Rp50.00 0.000	3 DOKU MEN	Rp50.00 0.000		Kabupaten Pamekasan		
		1.04.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									84 DOKU MEN	Rp5.247. 500	84 DOKU MEN	Rp5.247. 500		Kabupaten Pamekasan		

		1.04.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									24 DOKU MEN	Rp4.800. 000	24 DOKU MEN	Rp4.800. 000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									3 DOKU MEN	Rp35.63 1.118	3 DOKU MEN	Rp35.63 1.118		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik									100%	Rp3.185 .386.277	100%	Rp3.185. 386.277	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik									1 Unit Kerja	Rp3.185 .386.277	1 Unit Kerja	Rp3.185. 386.277	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									32 ORAN G/BU LAN	Rp3.185. 386.277	32 ORAN G/BU LAN	Rp3.185. 386.277		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur									80%	Rp175.0 00.000	80%	Rp175.0 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi									53 Aparatur	Rp175.000.000	53 Aparatur	Rp175.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									53 ORANG	Rp175.000.000	53 ORANG	Rp175.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi									100%	Rp1.492.163.027	100%	Rp1.492.163.027	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi									5 Sarana	Rp314.597.523	6 Sarana	Rp314.597.523	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									12 Paket	Rp5.760.000	12 Paket	Rp5.760.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									72 Paket	Rp41.011.969	72 Paket	Rp41.011.969		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									89 Paket	Rp32.313.460	89 Paket	Rp32.313.460		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									7 Paket	Rp40.000.000	7 Paket	Rp40.000.000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									80 Laporan	Rp195.512.094	80 Laporan	Rp195.512.094		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi									1 Prasar ana	Rp220.9 03.000	1 Prasar ana	Rp220.9 03.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										Rp0		Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										Rp0		Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									27 unit	Rp220.9 03.000	15 unit	Rp220.9 03.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan									3 Jasa Penun jang	Rp642.1 07.904	3 Jasa Penun jang	Rp642.1 07.904	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									2 Lapor an	Rp8.375. 000	2 Lapor an	Rp8.375. 000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									217 Lapor an	Rp77.83 2.904	217 Lapor an	Rp77.83 2.904		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									30 Lapor an	Rp555.9 00.000	30 Lapor an	Rp555.9 00.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah									3 Pemel iharaa n	Rp314.5 54.600	3 Pemel iharaa n	Rp314.5 54.600	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									5 Unit	Rp150.0 00.000	5 Unit	Rp150.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									148 Unit	Rp28.78 9.000	148 Unit	Rp28.78 9.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi									19 Unit	Rp135.7 65.600	19 Unit	Rp135.7 65.600		Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman				Rasio Permukiman Layak Huni												Rp0		Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan									57,53 %	Rp32.31 4.816.15 0	57,53 %	Rp32.31 4.816.150	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM									80 %	Rp32.31 4.816.15 0	80 %	Rp32.31 4.816.150	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.03.03.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan									12 SPAM	Rp32.314.816.150	7 SPAM	Rp32.314.816.150	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun									3 Dokumen	Rp300.000.000	2 dokumen	Rp300.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun									12 Liter/ Detik	Rp669.000.000	20 desa/kel	Rp669.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat									7800 SR	Rp22.843.484.250	309 Dusun	Rp22.843.484.250		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu									8 Liter/ Detik	Rp500.000.000	20 desa/kel	Rp500.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya									1 Desa	Rp2.499.000.000	3 Desa	Rp2.499.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.201.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada									160 SR	Rp500.000.000	20 desa/kel	Rp500.000.000		Kabupaten Pamekasan

				SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu															
		1.03.03 .2.01.0 8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki										5 Desa	Rp563.0 00.000	20 Desa	Rp563.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03 .2.01.1 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggara n SPAM yang Terbina dan Terawasi										5 Kelom pok Masya rakat	Rp1.360. 410.900	42 KKM	Rp1.360. 410.900		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03 .2.01.1 3	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama										1 Unit	Rp150.0 00.000	3 unit	Rp150.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03 .2.01.1 5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan										1 Unit	Rp100.0 00.000	2 paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03 .2.01.1 9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan										20 Desa	Rp2.325. 197.000	12 Desa	Rp2.325. 197.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03 .2.01.2 0	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi										4 Unit	Rp504.7 24.000	20 desa/k el	Rp504.7 24.000		Kabupaten Pamekasan

			Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan									67,65 %	Rp23.837.812.549	67,65 %	Rp23.837.812.549	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan									67,65 %	Rp7.693.976.700	67,65 %	Rp7.693.976.700	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan									13 SPAL	Rp7.693.976.700	2 SPAL	Rp7.693.976.700	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun									1 Dokumen	Rp250.000.000	1 dokumen	Rp250.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman									25 Rumah Tangga	Rp760.033.700	25 Desa	Rp760.033.700		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik									13 Orang	Rp100.000.000	10 lokasi	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.05 .2.01.0 8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									17 Kelom pok	Rp100.0 00.000	3 bln	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.0 9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik									13 Orang	Rp100.0 00.000	10 Pengel ola	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara									2 Unit	Rp100.0 00.000	2 Paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman									1 Doku men	Rp200.0 00.000	2 Paket	Rp200.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman									500 Ruma h Tangg a	Rp5.083. 943.000	30 Desa	Rp5.083. 943.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.05 .2.01.1 3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja									1 Unit	Rp300.000.000	1 unit	Rp300.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja									40 Rumah Tangga	Rp100.000.000	2 orang	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 5	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun									1 M3/Hari	Rp100.000.000	2 unit	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 6	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi									1 M3/Hari	Rp200.000.000	1 unit	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.05 .2.01.1 7	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT									1 Dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan									52,25 %	Rp16.143.835.849	52,25 %	Rp16.143.835.849	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.06 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan									3 Sistem Drainase	Rp16.143.835.849	1 Sistem Drainase	Rp16.143.835.849	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.06 .2.01.1 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun									14000 M	Rp14.618.705.350	2 Desa	Rp14.618.705.350		Kabupaten Pamekasan

		1.03.06 .201.1 4	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi									1350 M	Rp1.425.130.499	39 Desa	Rp1.425.130.499		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06 .201.1 6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun									1 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh									21%	Rp79.218.720.403	21%	Rp79.218.720.403	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan									80 %	Rp78.368.720.403	80 %	Rp78.368.720.403	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.07 .201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan									1 Infrastruktur	Rp78.368.720.403	1 Infrastruktur	Rp78.368.720.403	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.07 .201.0 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									268 Sistem Jaringan	Rp78.168.720.403	983 Unit	Rp78.168.720.403		Kabupaten Pamekasan
		1.03.07 .201.0 2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000	4 unit	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan

		1.03.07.201.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000	4 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani								94 %	Rp850.000.000	94 %	Rp850.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan								100%	Rp400.000.000		Rp400.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.202.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik								1 Dokumen	Rp100.000.000	2 paket	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.202.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta								3 Dokumen	Rp200.000.000	4 Dokumen	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan

			Permukiman Kumuh	Terlegalisasi														
		1.04.03 .2.02.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh									1 Lapor an	Rp100.0 00.000	2 paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya									1 Kawas an	Rp450.0 00.000	1 Kawas an	Rp450.0 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02.0 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh									3 Doku men	Rp350.0 00.000	9 Doku men	Rp350.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03 .2.02.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									1 Lapor an	Rp100.0 00.000	1 Paket	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni									97,77 %	Rp15.64 2.420.00 0	97,77 %	Rp15.64 2.420.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani									94 %	Rp6.619.920.000	94 %	Rp6.619.920.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya									3 Peningkatan Kualitas	Rp6.619.920.000	2 Peningkatan Kualitas	Rp6.619.920.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh									3 Dokumen	Rp100.000.000	3 Dokumen	Rp100.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki									270 Unit Rumah	Rp5.662.420.000	446 Unit	Rp5.662.420.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									3 Laporan	Rp857.500.000	9 Koordinasi	Rp857.500.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan									10 Laporan	Rp0	10 KK	Rp0		Kabupaten Pamekasan

			Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh														
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar									Ha	Rp0	10 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara n Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi									3 Dokumen	Rp0	3 Dokumen	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh									96,27 %	Rp7.697.500.000	96,27%	Rp7.697.500.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan									1 Perbaikan RTLH	Rp7.697.500.000	1 Perbaikan RTLH	Rp7.697.500.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki									348 Unit Rumah	Rp7.697.500.000	2473 Unit	Rp7.697.500.000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni									96,27 %	Rp1.325.000.000	96,27 %	Rp1.325.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan									6 Pendataan	Rp0	6 Pendataan	Rp0	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01.0 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									1 Dokumen	Rp0	9 Kecamatan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01.0 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan									Dokumen	Rp0	9 Kecamatan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01.0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									1 Dokumen	Rp0	9 Kecamatan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01.0 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana									Dokumen	Rp0	9 Kecamatan	Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									Doku men	Rp0	9 Kecam atan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									Doku men	Rp0	9 Kecam atan	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan									100%	Rp1.225.000.000	100%	Rp1.225.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi									50 Unit Ruma h	Rp875.000.000	91 Unit	Rp875.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									Doku men	Rp0	2 Doku men	Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.02 .2.03.0 3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota									Ha	Rp0	2 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun									10 Unit Ruma h	Rp350.000.000	30 Unit	Rp350.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun									5 Unit Ruma h	Rp0	30 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.03.0 6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan									Unit Ruma h	Rp0	90 Unit	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.06 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan									50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.02 .2.06.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara									1 Doku men	Rp50.000.000	10 izin	Rp50.000.000		Kabupaten Pamekasan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

		1.03.08 .201.0 1	Penyelenggaraa n Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG									200 Doku men	Rp300.0 00.000	600 Unit	Rp300.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan									100 %	Rp159.1 55.500	100 %	Rp159.1 55.500	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.05 .201	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU									77,77 %	Rp159.1 55.500	77,77 %	Rp159.1 55.500	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.04.05 .201.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									3 Lapor an	Rp159.1 55.500	6 PSU	Rp159.1 55.500		Kabupaten Pamekasan
		Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi									80 %	Rp27.77 3.538.06 1	80 %	Rp27.77 3.538.061	DPRK P	Kabupaten Pamekasan

	1.03.08.2.01	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan										2 Penyelengga raan	Rp9.111.130.661	2 Penyelengga raan	Rp9.111.130.661	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.08.2.01.0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota										2 Dokumen	Rp9.111.130.661	14 Dokumen	Rp9.111.130.661		Kabupaten Pamekasan
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata										40 %	Rp18.187.407.400	40 %	Rp18.187.407.400	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan										1 Penata an Bangu nan	Rp18.187.407.400	2 Penata an Bangu nan	Rp18.187.407.400	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
	1.03.09.2.01.0 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan										100 Kawas an	Rp18.187.407.400	600 unit	Rp18.187.407.400		Kabupaten Pamekasan

				Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi									24 %	Rp475.000.000	24 %	Rp475.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan									2 Penyelenggaraan	Rp275.000.000	2 Penyelenggaraan	Rp275.000.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan									150 Orang	Rp200.000.000	350 Orang	Rp200.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.201.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi									150 Orang	Rp75.000.000	350 Orang	Rp75.000.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.203	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan									1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp0	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.203.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi									0	Rp0	100 Badan Usaha	Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.03.11 .2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi									57,14 %	Rp200.0 00.000	57,14 %	Rp200.0 00.000	DPRK P	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .2.04.0 1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									1 Doku men	Rp25.00 0.000	2 Doku men	Rp25.00 0.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .2.04.0 2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									100 Orang	Rp100.0 00.000	200 Orang	Rp100.0 00.000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11 .2.04.0 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									100 Lapor an	Rp75.00 0.000	150 Badan Usaha Jasa Konstr uksi	Rp75.00 0.000		Kabupaten Pamekasan

➤ Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	(Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman) X 100%	DPRKP	DPRKP
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung	DPRKP
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPRKP

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	$(\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{Jumlah seluruh layak huni}) \times 100\%$	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	DPRKP
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	$(\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DPRKP
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	$(\text{Jumlah rumah tangga dengan air minum layak} / \text{Jumlah seluruh rumah tangga}) \times 100\%$	DPRKP	DPRKP
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	$(\text{Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak} / \text{Jumlah seluruh rumah tangga}) \times 100\%$	DPRKP	DPRKP

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian SAKIP 2020 : Perencanaan Kinerja 25% Pengukuran Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 10% Evaluasi Kinerja 20% Capaian Kinerja 20%	Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial.	DPRKP

➤ Matriks Renja 2022 dan Perubahannya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pamekasan

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kabupaten Pamekasan			Rp196.267.295.078	Rp226.178.561.006	DAU + DAK			Rp82.653.127.480
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Kabupaten Pamekasan			Rp162.951.853.468	Rp194.764.853.468	DAU + DAK			Rp62.325.442.975
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kabupaten Pamekasan	80%	80%	Rp32.687.139.869	Rp33.487.139.869	DAU + DAK		80%	Rp19.379.952.900
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	12 SPAM	11 SPAM	Rp32.687.139.869	Rp33.487.139.869	DAU + DAK		12 SPAM	Rp19.379.952.900
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	Kabupaten Pamekasan	2 dokumen	2 dokumen	Rp300.000.000	Rp300.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp300.000.000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	7 Desa	11 Desa	Rp650.000.000	Rp1.050.000.000	DAU		12 Liter/Detik	Rp650.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	Kabupaten Pamekasan	181 Dusun	214 Dusun	Rp21.197.496.851	Rp24.297.496.851	DAU		7800 SR	Rp9.950.000.000
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	4 Desa	4 Desa	Rp500.000.000	Rp500.000.000	DAU		8 Liter/Detik	Rp500.000.000
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	1 Desa	1 Desa	Rp5.058.690.118	Rp3.458.690.118	DAK		1 Desa	Rp2.499.000.000

1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	Kabupaten Pamekasan	2 Desa	2 Desa	Rp250.000.000	Rp250.000.000	DAU		160 SR	Rp500.000.000
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	5 Desa	5 Desa	Rp550.000.000	Rp550.000.000	DAU		5 Desa	Rp550.000.000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kabupaten Pamekasan	4 KKM	4 KKM	Rp1.360.410.900	Rp360.410.900	DAU		5 Kelompok Masyarakat	Rp1.360.410.900
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	Kabupaten Pamekasan	1 unit	1 unit	Rp150.000.000	Rp150.000.000	DAU		1 Unit	Rp150.000.000
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan	1 kegiatan	-	Rp100.000.000	Rp0	DAU		1 Unit	Rp100.000.000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	Kabupaten Pamekasan	12 Desa	12 Desa	Rp2.320.542.000	Rp2.320.542.000	DAK		20 Desa	Rp2.320.542.000
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	3 Desa	3 Desa	Rp250.000.000	Rp250.000.000	DAU		4 Unit	Rp500.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	66,65%	66,65%	Rp7.004.688.300	Rp6.890.688.300	DAU + DAK		66,65%	Rp7.493.976.700
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	8 SPAL	6 SPAL	Rp7.004.688.300	Rp6.890.688.300	DAU + DAK		8 SPALD	Rp7.493.976.700
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	Kabupaten Pamekasan							1 Dokumen	Rp250.000.000
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	8 Desa	8 Desa	Rp1.306.745.300	Rp1.406.745.300	DAU		15 Rumah Tangga	Rp560.033.700
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	Kabupaten Pamekasan	35 SDM	35 SDM	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		13 Orang	Rp100.000.000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah KSM yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten Pamekasan	32 Peserta	32 Peserta	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		17 Kelompok	Rp100.000.000

1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yg dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	12 SDM	12 SDM	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		13 Orang	Rp100.000.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan	2 Desa	2 Desa	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		2 Unit	Rp100.000.000
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan	1 Kegiatan	-	Rp114.000.000	Rp0	DAU		1 Dokumen	Rp200.000.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	9 Desa	9 Desa	Rp5.083.943.000	Rp5.083.943.000	DAK		500 Rumah Tangga	Rp5.083.943.000
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	Kabupaten Pamekasan							1 Unit	Rp300.000.000
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang disediakan	Kabupaten Pamekasan							40 Rumah Tangga	Rp100.000.000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	1 unit	-	Rp100.000.000	Rp0	DAU		1 M3/Hari	Rp100.000.000
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan							1 M3/Hari	Rp200.000.000
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan							1 Dokumen	Rp300.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	50,75%	49,25%	Rp2.725.130.499	Rp6.775.130.499	DAU		52,25%	Rp2.725.130.499
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	3 Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	Rp2.725.130.499	Rp6.775.130.499	DAU		3 Sistem Drainase	Rp2.725.130.499
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	8 Desa	35 Desa	Rp1.200.000.000	Rp5.250.000.000	DAU		1200 M	Rp1.200.000.000
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	9 Desa	9 Desa	Rp1.425.130.499	Rp1.425.130.499	DAU		1350 M	Rp1.425.130.499

1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	70%	70%	Rp77.409.894.800	Rp103.186.894.800	DAU		80%	Rp15.200.000.000
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	3 Infrastruktur	2 Infrastruktur	Rp77.409.894.800	Rp103.186.894.800	DAU		1 Infrastruktur	Rp15.200.000.000
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	495 Unit	658 Unit	Rp77.009.894.833	Rp102.986.894.833	DAU		97 Sistem Jaringan	Rp15.000.000.000
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	2 unit	2 unit	Rp199.999.967	Rp199.999.967	DAU		2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	2 Dokumen	-	Rp200.000.000	Rp0	DAU		2 Sistem Jaringan	Rp100.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	Kabupaten Pamekasan	28%	28%	Rp9.900.000.000	Rp8.925.000.000	DAU		30%	Rp7.051.382.876
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	Rp9.900.000.000	Rp8.925.000.000	DAU		2 Penyelenggaraan	Rp7.051.382.876
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	200 Unit	200 Unit	Rp300.000.000	Rp300.000.000	DAU		200 Dokumen	Rp300.000.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	Kabupaten Pamekasan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp9.600.000.000	Rp8.625.000.000	DAU		6 Dokumen	Rp6.751.382.876

		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	Kabupaten Pamekasan	6 Sarpras	6 Sarpras			DAU			
		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	Kabupaten Pamekasan	2 Gedung Kantor	2 Gedung Kantor			DAU			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	Kabupaten Pamekasan	39,00%	39,00%	Rp32.850.000.000	Rp35.150.000.000	DAU		40%	Rp10.000.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	Rp32.850.000.000	Rp35.150.000.000	DAU		1 Penataan Bangunan	Rp10.000.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Kabupaten Pamekasan	232 Unit	242 Unit	Rp32.850.000.000	Rp35.150.000.000	DAU		200 Kawasan	Rp10.000.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	24%	24%	Rp375.000.000	Rp350.000.000	DAU		24%	Rp475.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	DAU		2 Penyelenggaraan	Rp275.000.000
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	100 Orang	100 Orang	Rp150.000.000	Rp150.000.000	DAU		150 Orang	Rp200.000.000
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	Kabupaten Pamekasan	100 Orang	100 Orang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	DAU		150 Orang	Rp75.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	Kabupaten Pamekasan	28,57%	28,57%	Rp175.000.000	Rp150.000.000	DAU		57,14%	Rp200.000.000
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	-	Rp25.000.000	Rp0	DAU		1 Dokumen	Rp25.000.000
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kabupaten Pamekasan	100 Orang	100 Orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		100 Orang	Rp100.000.000
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kabupaten Pamekasan	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	Rp50.000.000	Rp50.000.000	DAU		100 Laporan	Rp75.000.000

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp33.315.441.610	Rp31.413.707.538				Rp20.327.684.505
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp97.047.500	Rp105.852.500	DAU		100%	Rp97.047.500
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	4 Perencanaan	4 Perencanaan	Rp97.047.500	Rp105.852.500	DAU		4 Perencanaan	Rp97.047.500
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg tersusun	Kabupaten Pamekasan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	77 Dokumen	62 Dokumen	Rp5.247.500	Rp5.247.500	DAU		75 Dokumen	Rp5.247.500
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	24 dokumen	22 dokumen	Rp4.800.000	Rp4.800.000	DAU		24 dokumen	Rp4.800.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kabupaten Pamekasan	3 dokumen	3 dokumen	Rp37.000.000	Rp45.805.000	DAU		3 dokumen	Rp37.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp3.093.906.530	Rp2.931.319.194	DAU		100%	Rp3.093.906.532
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp3.093.906.530	Rp2.931.319.194	DAU		1 Unit Kerja	Rp3.093.906.532
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Kabupaten Pamekasan	14 Bulan	14 Bulan	Rp3.093.906.530	Rp2.931.319.194	DAU		53 Orang/Bulan	Rp3.093.906.532
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Kabupaten Pamekasan	80%	80%	Rp118.530.000	Rp142.530.000	DAU		80%	Rp175.000.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	53 Aparatur	53 Aparatur	Rp118.530.000	Rp142.530.000	DAU		53 Aparatur	Rp175.000.000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Pamekasan	53 Aparatur	53 Aparatur	Rp118.530.000	Rp142.530.000	DAU		53 Orang	Rp175.000.000

1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp1.851.045.418	Rp1.974.086.218	DAU		100%	Rp1.469.310.473
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	5 Sarana	5 Sarana	Rp354.263.750	Rp361.318.750	DAU		6 Sarana	Rp373.447.969
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kabupaten Pamekasan	12 Komponen	12 komponen	Rp5.760.000	Rp5.760.000	DAU		12 Paket	Rp5.760.000
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	51 Peralatan Kantor	51 Peralatan Kantor	Rp44.102.000	Rp44.102.000	DAU		72 Paket	Rp41.011.969
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	Kabupaten Pamekasan	16 Alat Kebersihan	16 Alat Kebersihan						
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	12 Bulan	12 bulan	Rp39.700.000	Rp41.755.000	DAU		89 Paket	Rp39.700.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	7 Barang	7 Barang	Rp37.721.750	Rp42.721.750	DAU		7 Paket	Rp40.000.000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	80 Kali	80 Kali	Rp226.980.000	Rp226.980.000	DAU		80 Laporan	Rp246.976.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	3 Prasarana	3 Prasarana	Rp623.182.600	Rp623.182.600	DAU		1 Prasarana	Rp150.000.000
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	1 Kendaraan	1 Kendaraan	Rp330.093.500	Rp330.093.500	DAU			Rp0
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	5 Kendaraan	5 Kendaraan	Rp118.123.500	Rp118.123.500	DAU			Rp0
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	27 unit	27 unit	Rp174.965.600	Rp174.965.600	DAU		15 unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	3 Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	Rp634.939.068	Rp681.939.068	DAU		3 Jasa Penunjang	Rp642.107.904
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Jasa Layanan	2 Jasa Layanan	Rp8.375.000	Rp8.375.000	DAU		2 Laporan	Rp8.375.000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	6 Jasa Layanan	6 Jasa Layanan	Rp70.664.068	Rp117.664.068	DAU		217 Laporan	Rp77.832.904
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	11 Jasa Layanan	11 Jasa Layanan	Rp555.900.000	Rp555.900.000	DAU		30 Laporan	Rp555.900.000

1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Pamekasan	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	Rp238.660.000	Rp307.645.800	DAU		3 Pemeliharaan	Rp303.754.600
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	5 Kendaraan	5 Kendaraan	Rp119.921.000	Rp153.906.800	DAU		5 Unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Kabupaten Pamekasan	148 unit	148 unit	Rp28.789.000	Rp43.789.000	DAU		148 Unit	Rp28.789.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	19 ruang	19 Ruang	Rp89.950.000	Rp109.950.000	DAU		19 Unit	Rp124.965.600
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	Kabupaten Pamekasan	96,04%	96,04%	Rp2.307.492.162	Rp1.257.499.626	DAU		96,27%	Rp1.925.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	6 Pendataan	6 Pendataan	Rp599.999.580	Rp499.999.626	DAU		6 Pendataan	Rp200.000.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp99.999.918	DAU		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp99.999.930	DAU		Dokumen	Rp0
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp99.999.918	DAU		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp99.999.930	DAU		Dokumen	Rp0
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp99.999.930	DAU		Dokumen	Rp0
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yg disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp99.999.930	Rp0	DAU		Dokumen	Rp0

1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	40,39%	40,39%	Rp1.507.499.990	Rp757.500.000	DAU		100,00%	Rp1.575.000.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	41 Unit	41 Unit	Rp717.500.000	Rp717.500.000	DAU		50 Unit Rumah	Rp875.000.000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp49.999.990	Rp0	DAU		Dokumen	Rp0
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yg diadakan	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	1 Unit	Rp100.000.000	Rp0	DAU		Ha	Rp0
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	10 Unit	10 Unit	Rp300.000.000	Rp0	DAU		10 Unit Rumah	Rp350.000.000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	10 Unit	10 Unit	Rp300.000.000	Rp0	DAU		5 Unit Rumah	Rp350.000.000
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan	40 Unit	40 Unit	Rp40.000.000	Rp40.000.000	DAU		Unit Rumah	Rp0
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan	25%	0,25	Rp100.000.000	Rp0	DAU		50%	Rp100.000.000
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	5 Izin	-	Rp50.000.000	Rp0	DAU		1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan	Kabupaten Pamekasan	5 Koordinasi	-	Rp50.000.000	Rp0	DAU		5 Laporan	Rp50.000.000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan	50 Unit	50 Unit	Rp99.992.592	Rp0	DAU		1	Rp50.000.000
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang	Kabupaten Pamekasan	100 Unit	-	Rp99.992.592	Rp0	DAU		50 Laporan	Rp50.000.000

		dikoordinasikan									
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Kabupaten Pamekasan	92%	92%	Rp12.604.920.000	Rp11.759.920.000	DAU + DAK		94%	Rp7.362.420.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan	50%	50%	Rp1.035.000.000	Rp190.000.000	DAU		100%	Rp400.000.000
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan	1 Paket	1 Paket	Rp300.000.000	Rp0	DAU		1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	Kabupaten Pamekasan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp650.000.000	Rp190.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp200.000.000
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	1 Paket	1 Paket	Rp85.000.000	Rp0	DAU		1 Laporan	Rp100.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	1 Kawasan	1 Kawasan	Rp350.000.000	Rp350.000.000	DAU		1 Kawasan	Rp450.000.000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	Kabupaten Pamekasan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp350.000.000	Rp350.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp350.000.000
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan							1 Laporan	Rp100.000.000

1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	2 Peningkatan Kualitas	2 Peningkatan Kualitas	Rp11.219.920.000	Rp11.219.920.000	DAU + DAK		3 Peningkatan Kualitas	Rp6.512.420.000
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun	Kabupaten Pamekasan							3 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	270 Unit	270 Unit	Rp9.962.420.000	Rp9.962.420.000	DAK		270 Unit Rumah	Rp5.662.420.000
1.04.03.2.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	3 Koordinasi	3 Koordinasi	Rp1.257.500.000	Rp1.257.500.000	DAU		3 Laporan	Rp750.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Pamekasan	96,04%	96,04%	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	DAU		96,27%	Rp6.105.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Kabupaten Pamekasan	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	DAU		1 Perbaikan RTLH	Rp6.105.000.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	751 Unit	751 Unit	Rp13.142.500.000	Rp13.142.500.000	DAU		348 Unit Rumah	Rp6.105.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	66,66%	66,66%	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		100,00%	Rp100.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Kabupaten Pamekasan	44,44%	44,44%	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		77,77%	Rp100.000.000

1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan	2 PSU	2 PSU	Rp100.000.000	Rp100.000.000	DAU		3 Laporan	Rp100.000.000
-----------------	--	---	---------------------	-------	-------	---------------	---------------	-----	--	-----------	---------------

➤ Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 03 Februari 2022

Pihak Kedua

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	59,95 %
2.	Meningkatnya Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,94%
		Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	60%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	97,57%
3.	Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	42%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp32,687,139,869	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp7,004,688,300	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp2,725,130,499	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp77,409,894,800	APBD
5.	Program Kawasan Permukiman	Rp12,604,920,000	APBD + APBN
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp9,900,000,000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp32,850,000,000	APBD
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp375,000,000	APBD
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp2,307,492,162	APBD
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp13,142,500,000	APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp100,000,000	APBD
JUMLAH		Rp191,106,765,630	APBD + APBN

Pamekasan, 03 Februari 2022

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST



PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 05 Desember 2022

Pihak Kedua

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN (PAK) TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	78,94%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	60%
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,57%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	42%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	56,53%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	66,65%
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp 33.487.139.869	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.890.688.300	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 6.775.130.499	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 103.186.894.800	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 8.925.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 35.150.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 350.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.257.499.626	APBD
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp 11.759.920.000	APBD + APBN
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp13,142,500,000	APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp100,000,000	APBD
JUMLAH		Rp 221.024.773.094	APBD + APBN

Pamekasan, 05 Desember 2022

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

➤ LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA s.d TRIWULAN IV

Formulir E.81 PAK

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/kota Pamekasan
Periode Pelaksanaan Tahun 2022 s/d Tahun 2023

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPd:

RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI, 59.95%

No	Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I	II	III	IV													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100 %		13 = 5+11		14=13/4*1 00%		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	60,0 9%	Rp18 4.19 4.69 0.58 5	5 7 % 182.93 8.402.5 98 5	5 9 % 6.17 8.56 1.00 6	Rp22 , 7 8	1 5 % 5.71 7.08 5 8	Rp56 , 5 8	5 1 % 196. 391. 081	5 0 % 9.40 1.61 7.43 7 5	Rp10 , 0 8	1 5 % 9.40 1.61 7.43 7 5	3 0 % .302. 840. 216	Rp55 , 2 , 9 0	5 2 % 3.46 6.56 5.81 9 0	Rp17 3.46 6.56 5.81 9 0	88,2 4%	76,6 9%	1 0 % 6.40 4.96 8.41 , 9 5	Rp35 6.40 4.96 8.41 7 5	18 2,9 7%	193, 49%	DPRKP	
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90	Rp4. 948. 227. 922	8 3 , 6 9	2.950.6 88.073	8 5 , 0 0	Rp5. 153. 787. 912	Rp56 5.71 7.08 5	Rp1. 199. 796. 385	Rp1. 131. 735. 394	Rp1. 333. 217. 816	8 3 , 9 5	Rp4. 230. 466. 680	98,7 6%	82,0 8%	1 6 7 , 6 4	Rp7. 181. 154. 753	18 6,2 7%	145, 13%	DPRKP				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	Rp95 .678. 618	9 8 % , 4 2	45.763. 350	1 0 % 5.85 2.50 0	Rp10 , 1 3	9 8 % , 1 3	Rp11 .009. 200	9 5 % , 3 3	Rp43 .827. 200	7 8 % , 5 0	Rp66 .950. 900	78,5 0%	63,2 5%	1 7 6 , 9 2	Rp11 2.71 4.25 0	17 6,9 2%	117, 81%	DPRKP				

4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp95.678.618	4 erencana	45.763.350	4 Perencanaan	Rp105.852.500	4 Perencanaan	Rp1.963.000	4 Perencanaan	Rp11.009.200	4 Perencanaan	Rp10.151.500	4 Perencanaan	Rp43.827.200	4 Perencanaan	Rp66.950.900	100,00%	63,25%	4 Perencanaan	Rp112.714.250	100,00%	117,81%	DPRKP
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	Rp50.000.000	2 Dokumen	28.071.700	3 Dokumen	Rp50.000.000	2 Dokumen	Rp64.600.000	1 Dokumen	Rp7.018.000	0 Dokumen	Rp5.962.000	0 Dokumen	Rp32.940.100	3 Dokumen	Rp46.566.100	100,00%	93,13%	5 Dokumen	Rp74.637.800	166,67%	149,28%	DPRKP
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	71 Dokumen	Rp5.247.500	4 Dokumen	4.770.000	7 Dokumen	Rp5.247.500	7 Dokumen	Rp13.340.000	7 Dokumen	Rp2.061.800	7 Dokumen	Rp89.380.000	6 Dokumen	Rp1.444.500	6 Dokumen	Rp4.533.500	80,52%	86,39%	10 Dokumen	Rp9.303.500	122,89%	177,29%	DPRKP
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	22 Dokumen	Rp4.800.000	18 Dokumen	4.359.900	24 Dokumen	Rp4.800.000	24 Dokumen	Rp1.183.600	24 Dokumen	Rp0	24 Dokumen	Rp1.188.600	22 Dokumen	Rp2.158.800	22 Dokumen	Rp4.531.000	91,67%	94,40%	40 Dokumen	Rp8.890.900	160,00%	185,23%	DPRKP
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	Rp35.631.118	3 dokumen	8.561.750	3 dokumen	Rp45.805.000	2 dokumen	Rp0	0 dokumen	Rp1.929.400	0 dokumen	Rp2.107.100	1 dokumen	Rp7.283.800	3 dokumen	Rp11.320.300	100,00%	24,71%	6 dokumen	Rp19.882.050	200,00%	55,80%	DPRKP
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Rp3.185.386.277	100%	1.731.13.990	100%	Rp2.931.319.194	2%	Rp419.800.441	3%	Rp979.346.234	2%	Rp840.775.047	2%	Rp481.318.680	1%	Rp2.721.240.402	100,00%	92,83%	200%	Rp4.452.354.392	200,00%	139,77%	DPRKP

10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp3.185.386.277	1 Unit Kerja	1.731.13.990	1 Unit Kerja	Rp2.931.319.194	1 Unit Kerja	Rp419.800.441	1 Unit Kerja	Rp979.346.234	1 Unit Kerja	Rp840.775.047	1 Unit Kerja	Rp481.318.680	1 Unit Kerja	Rp2.721.240.402	100,00%	92,83%	1 Unit Kerja	Rp4.452.354.392	100,00%	139,77%	DPRKP
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	Rp3.185.386.277	1 Bulan	1.731.13.990	1 Bulan	Rp2.931.319.194	3 Bulan	Rp419.800.441	5 Bulan	Rp979.346.234	3 Bulan	Rp840.775.047	3 Bulan	Rp481.318.680	1 Bulan	Rp2.721.240.402	100,00%	92,83%	2 Bulan	Rp4.452.354.392	200,00%	139,77%	DPRKP
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	Rp175.000.000	4%	85.950.000	8%	Rp142.530.000	9%	Rp19.700.000	7%	Rp18.629.819	1%	Rp42.201.340	2%	Rp17.434.003	4%	Rp97.965.162	62,26%	68,73%	1%	Rp183.915.162	124,53%	105,09%	DPRKP
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	Rp175.000.000	3 Aparatur	85.950.000	5 Aparatur	Rp142.530.000	6 Aparatur	Rp19.700.000	5 Aparatur	Rp18.629.819	8 Aparatur	Rp42.201.340	1 Aparatur	Rp17.434.003	3 Aparatur	Rp97.965.162	67,92%	68,73%	6 Aparatur	Rp183.915.162	130,19%	105,09%	DPRKP
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	Rp175.000.000	3 Aparatur	85.950.000	5 Aparatur	Rp142.530.000	6 Aparatur	Rp19.700.000	5 Aparatur	Rp18.629.819	1 Aparatur	Rp42.201.340	1 Aparatur	Rp17.434.003	4 Aparatur	Rp97.965.162	75,47%	68,73%	7 Aparatur	Rp183.915.162	137,74%	105,09%	DPRKP
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	Rp1.492.163.027	8%	1.087.860.733	1%	Rp1.974.086.218	1%	Rp124.253.644	1%	Rp190.811.132	2%	Rp238.607.750	3%	Rp790.637.933	8%	Rp1.344.310.216	85,29%	68,10%	1%	Rp2.432.170.949	172,90%	163,00%	DPRKP

16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 Sarana	Rp31 4.59 7.52 3	5 Sarana	156.23 7.028	5 Sarana	Rp36 1.31 8.75 0	4 Sarana	Rp24 .585. 600	4 Sarana	Rp23 .786. 800	4 Sarana	Rp69 .644. 813	5 Sarana	Rp13 8.31 7.49 1	5 Sarana	Rp25 6.33 4.70 4	100 %	70,9 4%	9 Sarana	Rp41 2.57 1.73 2	15 0,0 0%	131, 14%	DPRKP
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 komponen	Rp5. 760. 000	8 komponen	3.471.8 50	12 komponen	Rp5. 760. 000	0 komponen	Rp0	0 komponen	Rp0	0 komponen	Rp0	10 komponen	Rp2. 691. 700	10 komponen	Rp2. 691. 700	83,3 3%	46,7 3%	18 komponen	Rp6. 163. 550	15 0,0 0%	107, 01%	DPRKP
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Peralatan	Rp41 .011. 969	4 Peralatan	21.474. 500	67 Peralatan	Rp44 .102. 000	2 Peralatan	Rp2. 460. 000	3 Peralatan	Rp7. 622. 500	3 Peralatan	Rp10 .111. 100	6 Peralatan	Rp12 .797. 200	6 Peralatan	Rp32 .990. 800	95,5 2%	74,8 1%	105 Peralatan	Rp54 .465. 300	14 5,8 3%	132, 80%	DPRKP
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bula n	Rp32 .313. 460	6 bula n	20.110. 000	12 bula n	Rp41 .755. 000	3 bula n	Rp2. 799. 000	3 bula n	Rp3. 365. 300	3 bula n	Rp2. 696. 400	3 bula n	Rp8. 031. 400	12 bula n	Rp16 .892. 100	100, 00%	40,4 6%	18 bula n	Rp37 .002. 100	15 0,0 0%	114, 51%	DPRKP
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Bara ng	Rp40 .000. 000	5 Bara ng	26.271. 800	7 Bara ng	Rp42 .721. 750	4 Bara ng	Rp2. 236. 600	3 Bara ng	Rp8. 435. 000	4 Bara ng	Rp9. 316. 600	7 Bara ng	Rp18 .466. 200	7 Bara ng	Rp38 .454. 400	100 %	90,0 1%	10 Bara ng	Rp64 .726. 200	16 6,6 7%	161, 82%	DPRKP
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali	Rp19 5.51 2.09 4	3 K 5 l 0 i	84.908. 878	80 K a l i	Rp22 6.98 0.00 0	1 K a l i	Rp17 .090. 000	3 K a l i	Rp4. 364. 000	2 K a l i	Rp47 .520. 713	4 K a l i	Rp96 .330. 991	8 K a l i	Rp16 5.30 5.70 4	100, 00%	72,8 3%	115 K a l i	Rp25 0.21 4.58 2	14 3,7 5%	127, 98%	DPRKP
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Pras arana	Rp22 0.90 3.00 0	1 Pr as arana	308.00 8.000	3 Pr as arana	Rp62 3.18 2.60 0	0 Pr as arana	Rp0	0 Pr as arana	Rp0	0 Pr as arana	Rp0	3 Pr as arana	Rp39 6.10 0.00 0	3 Pr as arana	Rp39 6.10 0.00 0	100, 00%	63,5 6%	4 Pr as arana	Rp70 4.10 8.00 0	40 0,0 0%	318, 74%	DPRKP

23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0	Rp0			1 Ke nd ar aa n	Rp33 0.09 3.50 0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	1 Ke nd ar aa n	Rp29 6.10 0.00 0	1 Ke nd ar aa n	Rp29 6.10 0.00 0	100, 00%	89,7 0%	1	Rp29 6.10 0.00 0	10 0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	Rp0			5 Ke nd ar aa n	Rp11 8.12 3.50 0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	0 Ke nd ar aa n	Rp0	5 Ke nd ar aa n	Rp10 0.00 0.00 0	5 Ke nd ar aa n	Rp10 0.00 0.00 0	100, 00%	84,6 6%	5 , 0 0	Rp10 0.00 0.00 0	8,3 2%	#DIV /0!	DPRKP
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	27 unit	Rp22 0.90 3.00 0	9 un it , 0 0	308.00 8.000	2 7 un it	Rp17 4.96 5.60 0	0 un it	Rp0	0 un it	Rp0	0 un it	Rp0	2 7 un it	Rp0	2 un it , 0 0	Rp0	100, 00%	0,00 %	1 1 un it 9	Rp30 8.00 8.00 0	44 0,7 4%	139, 43%	DPRKP
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penu njan g	Rp64 2.10 7.90 4	3 Ja , sa 0 Pe 0 nu nj an g	482.43 4.830	3 Ja sa Pe nu nj an g	Rp68 1.93 9.06 8	2 Ja sa Pe nu nj an g	Rp85 .723. 044	3 Ja sa Pe nu nj an g	Rp12 0.97 2.43 2	3 Ja sa Pe nu nj an g	Rp12 9.62 4.04 4	3 Ja sa Pe nu nj an g	Rp20 0.91 0.89 4	3 Ja , sa 0 Pe 0 nu nj an g	Rp53 7.23 0.41 4	100, 00%	78,7 8%	6 Ja sa Pe nu nj an g	Rp1. 019. 665. 244	20 0,0 0%	158, 80%	DPRKP
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jasa Laya nan	Rp8. 375. 000	2 Ja , sa 0 La ya na n	4.090.0 00	2 Ja sa La ya na n	Rp8. 375. 000	0 Ja sa La ya na n	Rp0	2 Ja sa La ya na n	Rp1. 264. 000	2 Ja sa La ya na n	Rp1. 000. 000	2 Ja sa La ya na n	Rp4. 641. 000	2 Ja sa La ya na n	Rp6. 905. 000	100, 00%	82,4 5%	4 Ja sa La ya na n	Rp10 .995. 000	20 0,0 0%	131, 28%	DPRKP
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6 Jasa Laya nan	Rp77 .832. 904	6 Ja , sa 0 La ya na n	62.318. 452	6 Ja sa La ya na n	Rp11 7.66 4.06 8	6 Ja sa La ya na n	Rp12 .216. 796	6 Ja sa La ya na n	Rp12 .613. 141	6 Ja sa La ya na n	Rp14 .650. 463	6 Ja sa La ya na n	Rp34 .140. 488	6 Ja sa La ya na n	Rp73 .620. 888	100, 00%	62,5 7%	1 2 Ja sa La ya na n	Rp13 .593 9.34 0	20 0,0 0%	174, 66%	DPRKP

29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Jasa Layan an	Rp55 5.90 0.00 0	1 Ja sa La ya na n	416.02 6.378	1 Ja sa La ya na n	Rp55 5.90 0.00 0	11 Ja sa La ya na n	Rp73 .506. 248	1 Ja sa La ya na n	Rp10 7.09 5.29 1	1 Ja sa La ya na n	Rp11 3.97 3.58 1	1 Ja sa La ya na n	Rp16 2.12 9.40 6	1 Ja sa La ya na n	Rp45 6.70 4.52 6	100, 00%	82,1 6%	2 Ja sa La ya na n	Rp87 2.73 0.90 4	20 0,0 0%	156, 99%	DPRKP
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pem eliha raan	Rp31 4.55 4.60 0	3 Pe m eli ha ra an	141.18 0.875	3 Pe m eli ha ra an	Rp30 7.64 5.80 0	2 Pe m eli ha ra an	Rp13 .945. 000	3 Pe m eli ha ra an	Rp46 .051. 900	3 Pe m eli ha ra an	Rp39 .338. 650	3 Pe m eli ha ra an	Rp55 .309. 548	3 Pe m eli ha ra an	Rp15 4.64 5.09 8	100, 00%	50,2 7%	6 Pe m eli ha ra an	Rp29 5.82 5.97 3	20 0,0 0%	94,0 5%	DPRKP
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Kend araan	Rp15 0.00 0.00 0	4 Ke nd ar aa n	81.074. 375	5 Ke nd ar aa n	Rp15 3.90 6.80 0	5 Ke nd ar aa n	Rp9. 900. 000	5 Ke nd ar aa n	Rp16 .170. 500	5 Ke nd ar aa n	Rp13 .750. 000	5 Ke nd ar aa n	Rp48 .540. 148	5 Ke nd ar aa n	Rp88 .360. 648	100, 00%	57,4 1%	9 Ke nd ar aa n	Rp16 9.43 5.02 3	18 0,0 0%	112, 96%	DPRKP
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	148 unit	Rp28 .789. 000	9 un it 0	19.018. 000	1 un it 0	Rp43 .789. 000	5 un it	Rp4. 045. 000	7 un it	Rp5. 613. 000	4 un it	Rp3. 614. 000	9 un it	Rp6. 769. 400	2 un it 0	Rp20 .041. 400	16,8 9%	45,7 7%	1 un it 0	Rp39 .059. 400	83, 11 %	135, 67%	DPRKP
33	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	19 Ruan g	Rp13 5.76 5.60 0	1 Ru an g 0	41.088. 500	1 Ru an g	Rp10 9.95 0.00 0	0 Ru an g	Rp0	4 Ru an g	Rp24 .268. 400	4 Ru an g	Rp21 .974. 650	0 Ru an g	Rp0	8 Ru an g 0	Rp46 .243. 050	42,1 1%	42,0 6%	2 Ru an g	Rp87 .331. 550	12 1,0 5%	64,3 3%	DPRKP

34	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	57,5 3%	Rp32 .314. 816. 150	5 2 , 5 5	% 39.918. 519.50 1	5 6 , 5 3	% Rp33 .487. 139. 869	0 %	Rp0	0 , 0 0	% Rp82 3.13 2.09 6	2 3 , 5 5	% Rp13 .485. 437. 683	2 0 , 4 1	% Rp9. 402. 854. 015	4 3 , 9 7	% Rp23 .711. 423. 794	77,7 8%	70,8 1%	9 7 %	Rp63 .629. 943. 295	16 7,7 6%	196, 91%	DPRKP	
35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80 %	Rp32 .314. 816. 150	7 5 , 7 0	% 39.918. 519.50 1	8 0	% Rp33 .487. 139. 869	0 %	Rp0	0 , 0 0	% Rp82 3.13 2.09 6	3 3 , 3 3	% Rp13 .485. 437. 683	2 8 , 8 9	% Rp9. 402. 854. 015	6 2 , 2 2	% Rp23 .711. 423. 794	77,7 8%	70,8 1%	1 3 8 %	Rp63 .629. 943. 295	17 2,4 0%	196, 91%	DPRKP	
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	7 SPA M	Rp32 .314. 816. 150	7 S P A M	39.918. 519.50 1	1 1 S P A M	Rp33 .487. 139. 869	0 S P A M	Rp0	2 S P A M	Rp82 3.13 2.09 6	7 S P A M	Rp13 .485. 437. 683	1 0 S P A M	Rp9. 402. 854. 015	1 0 S P A M	Rp23 .711. 423. 794	90,9 1%	70,8 1%	1 7 S P A M	Rp63 .629. 943. 295	24 2,8 6%	196, 91%	DPRKP	
37	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	3 doku men	Rp30 0.00 0.00 0	2 , 0 0	do ku m en	2 do ku m en	Rp30 0.00 0.00 0	0 do ku m en	Rp0	1 do ku m en	Rp58 .963. 200	1 do ku m en	Rp20 1.85 6.75 0	0 do ku m en	Rp7. 640. 000	2 , 0 0	do ku m en	Rp26 8.45 9.95 0	100, 00%	89,4 9%	4 do ku m en	Rp46 0.31 4.55 0	20 0,0 0%	153, 44%	DPRKP
38	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	6 desa /kel	Rp66 9.00 0.00 0			1 de sa /k el	Rp1. 050. 000. 000	0 de sa /k el	Rp0	0 de sa /k el	Rp0	0 de sa /k el	Rp5. 250. 000	7 de sa /k el	Rp60 0.26 5.00 0	7 , 0 0	D es a	Rp60 5.51 5.00 0	63,6 4%	57,6 7%	7 , 0 0	Rp60 5.51 5.00 0	70, 00 %	90,5 1%	DPRKP
39	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	40 Dusu n	Rp22 .843. 484. 250	2 9 4 , 0 0	D us un	2 1 4 D us un	Rp24 .297. 496. 851	0 D us un	Rp0	0 D us un	Rp0	8 9 D us un	Rp10 .282. 544. 200	7 3 D us un	Rp6. 750. 038. 639	1 6 2 , 0 0	D us un	Rp17 .032. 582. 839	75,7 0%	70,1 0%	4 5 6 D us un	Rp50 .561. 374. 917	47 0,1 0%	221, 34%	DPRKP

40	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	4 desa /kel	Rp50 0.00 0.00 0		-	4 Des a	Rp50 0.00 0.00 0	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp0	4 Des a	Rp45 3.98 9.20 0	0 Des a	Rp22 .586. 050	4 Des a	Rp47 6.57 5.25 0	100, 00%	95,3 2%	4 , 0 0	Rp47 6.57 5.25 0	40, 00 %	95,3 2%	DPRKP
41	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	1 Desa	Rp2. 499. 000. 000	1 Des a	1.783.0 60.756	1 Des a	Rp3. 458. 690. 118	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp76 4.16 8.89 6	0 Des a	Rp49 9.82 9.03 3	1 Des a	Rp89 9.69 2.25 9	1 Des a	Rp2. 163. 690. 188	100, 00%	62,5 6%	2 Des a	Rp3. 946. 750. 944	20 0,0 0%	157, 93%	DPRKP
42	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	4 desa /kel	Rp50 0.00 0.00 0			2 Des a	Rp25 0.00 0.00 0	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp0	2 Des a	Rp23 7.46 4.00 0	2 Des a	Rp23 7.46 4.00 0	100, 00%	94,9 9%	2 , 0 0	Rp23 7.46 4.00 0	20, 00 %	47,4 9%	DPRKP
43	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	5 Desa	Rp56 3.00 0.00 0	9 Des a	1.061.7 58.700	5 Des a	Rp55 0.00 0.00 0	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp0	0 Des a	Rp0	5 Des a	Rp49 8.06 7.00 0	5 Des a	Rp49 8.06 7.00 0	100, 00%	90,5 6%	1 4 Des a	Rp1. 559. 825. 700	28 0,0 0%	277, 06%	DPRKP
44	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	5 KKM	Rp1. 360. 410. 900	4 KK M	1.333.8 94.000	4 KK M	Rp36 0.41 0.90 0	0 KK M	Rp0	0 KK M	Rp0	0 KK M	Rp0	0 KK M	Rp0	- KK M	Rp0	0,00 %	0,00 %	4 KK M	Rp1. 333. 894. 000	13 3,3 3%	98,0 5%	DPRKP
45	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	Rp15 0.00 0.00 0	1 un it	37.690. 000	1 un it	Rp15 0.00 0.00 0	0 un it	Rp0	0 un it	Rp0	0 un it	Rp0	1 un it	Rp68 .267. 267	1 un it	Rp68 .267. 267	100, 00%	45,5 1%	2 un it	Rp10 5.95 7.26 7	20 0,0 0%	70,6 4%	DPRKP
46	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara	1 pake t	Rp10 0.00 0.00 0			1 ke gi at an	Rp0	0 ke gi at an	Rp0	0 ke gi at an	Rp0	0 ke gi at an	Rp0	0 ke gi at an	Rp0	-	Rp0	0,00 %	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP

47	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	20 Desa	Rp2.325.197.000	1 0 D es a	1.981.469.367	1 2 D es a	Rp2.320.542.000	0 D es a	Rp0	0 D es a	Rp0	1 2 D es a	Rp2.038.144.500	0 D es a	Rp94.858.600	1 2 D es a	Rp2.133.003.100	100,00%	91,92%	2 2 D es a	Rp4.114.472.467	18 3,3%	176,95%	DPRKP
48	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	4 desa /kel	Rp504.724.000			3 de sa /kel	Rp250.000	0 de sa /kel	Rp0	0 de sa /kel	Rp0	0 de sa /kel	Rp3.824.000	3 de sa /kel	Rp223.975.200	3 D es a	Rp227.799.200	100,00%	91,12%	3 , 0 0	Rp227.799.200	30,00%	45,13%	DPRKP
49	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	67,65%	Rp23.837.812.549	6 2 , 5 2 %	21.931.926.598	6 6 , 6 5 %	Rp13.665.818.799	0 %	Rp0	0 , 0 0 %	Rp255.552.0095	2 2 , 9 5 %	Rp5.404.470.510	1 4 , 2 0 %	Rp3.365.693.490	3 7 , 1 5 %	Rp9.025.716.000	55,74%	66,05%	9 9 , 6 7 %	Rp30.957.642.598	16 5,87%	129,87%	DPRKP
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	67,65%	Rp7.693.976.700	6 2 , 9 7 %	17.330.507.098	6 6 , 6 5 %	Rp6.890.688.300	0 %	Rp0	0 , 0 0 %	Rp99.264.000	4 7 , 0 5 %	Rp4.291.920.510	1 5 , 6 8 %	Rp2.064.958.490	6 2 , 7 3 %	Rp6.456.143.000	94,12%	93,69%	1 2 5 , 7 0 %	Rp23.786.650.098	18 5,81%	309,16%	DPRKP
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	13 SPAL	Rp7.693.976.700	2 SP AL D	17.330.507.098	6 SP AL D	Rp6.890.688.300	0 SP AL D	Rp0	3 SP AL D	Rp99.264.000	5 SP AL D	Rp4.291.920.510	5 SP AL D	Rp2.064.958.490	5 SP AL D	Rp6.456.143.000	83,33%	93,69%	7 SP AL D	Rp23.786.650.098	53,85%	309,16%	DPRKP
53	Rehabilitasi/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	3 Desa	Rp760.033.700	1 7 0 D es a	2.929.904.700	8 D es a	Rp1.406.745.300	0 D es a	Rp0	0 D es a	Rp46.000.000	3 D es a	Rp768.924.310	4 D es a	Rp461.550.490	7 D es a	Rp1.276.474.800	87,50%	90,74%	2 4 D es a	Rp4.206.379.500	80 0,0%	553,45%	DPRKP

54	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	12 SDM	Rp10 0.00 0.00 0			3 5 D M	Rp10 0.00 0.00 0	0 D M	Rp0	3 5 D M	Rp14 .264. 000	0 D M	Rp48 .075. 000	0 D M	Rp1. 300. 000	3 5 D M 0 0	Rp63 .639. 000	100, 00%	63,6 4%	3 5 D M 0 0	Rp63 .639. 000	70 0,0 0%	63,6 4%	DPRKP
55	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	36 Pese rta	Rp10 0.00 0.00 0			3 2 Pe se rt a	Rp10 0.00 0.00 0	0 Pe se rt a	Rp0	0 Pe se rt a	0	3 2 Pe se rt a	Rp2. 088. 000	0 Pe se rt a	Rp11 .453. 000	3 2 Pe se rt a 0 0	Rp13 .541. 000	100, 00%	13,5 4%	3 2 D M 0 0	Rp13 .541. 000	64 0,0 0%	13,5 4%	DPRKP
56	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan	13 SDM	Rp10 0.00 0.00 0			1 2 D M	Rp10 0.00 0.00 0	0 D M	Rp0	0 D M	0	1 2 D M	Rp12 .820. 600	0 D M	Rp63 .130. 000	1 2 D M 0 0	Rp75 .950. 600	100, 00%	75,9 5%	1 2 D M 0 0	Rp75 .950. 600	24 0,0 0%	75,9 5%	DPRKP
57	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	2 Desa	Rp10 0.00 0.00 0			2 D es a	Rp10 0.00 0.00 0	0 D es a	Rp0	0 D es a	0	0 D es a	Rp0	0 D es a	Rp0	- D es a	Rp0	0,00 %	0,00 %	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP
58	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan	1 Kegi atan	Rp20 0.00 0.00 0			1 Ke gi at an	Rp0	0 Ke gi at an	Rp0	0 Ke gi at an	0	0 Ke gi at an	Rp0	0 Ke gi at an	Rp0	- Ke gi at an	Rp0	0,00 %	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP
59	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	9 Desa	Rp5. 083. 943. 000	3 D e s a 0 0 0	14.400. 602.39 8	9 D e s a	Rp5. 083. 943. 000	0 D e s a	Rp0	0 D e s a	Rp39 .000. 000	9 D e s a	Rp3. 460. 012. 600	0 D e s a	Rp1. 527. 525. 000	9 D e s a 0 0 0	Rp5. 026. 537. 600	100, 00%	98,8 7%	3 9 D e s a	Rp19 .427. 139. 998	43 3,3 3%	382, 13%	DPRKP

62	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun	1 unit	Rp10 0.00 0.00 0			1 unit	Rp0	0 unit	Rp0	0 unit	Rp0	0 unit	Rp0	0 unit	Rp0	0 unit	0,00 %	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP	
65	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	52,2 5%	Rp16 .143. 835. 849	4 6 , 4 4 %	4.601.4 19.500	5 0 , 7 5 %	Rp6. 775. 130. 499	0 %	Rp0	0 %	Rp15 6.28 8.00 0	1 0 , 3 8 %	Rp1. 112. 550. 000	1 0 , 3 8 %	Rp1. 300. 735. 000	2 0 , 7 6 %	Rp2. 569. 573. 000	40,9 1%	37,9 3%	6 7 , 2 0 %	Rp7. 170. 992. 500	12 8,6 1%	44,4 2%	DPRKP
66	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	Rp16 .143. 835. 849	1 0 0 Sistem Drainase	4.601.4 19.500	3 Sistem Drainase	Rp6. 775. 130. 499	0 Sistem Drainase	Rp0	2 Sistem Drainase	Rp15 6.28 8.00 0	2 Sistem Drainase	Rp1. 112. 550. 000	3 Sistem Drainase	Rp1. 300. 735. 000	3 0 0 Sistem Drainase	Rp2. 569. 573. 000	100, 00%	37,9 3%	4 Sistem Drainase	Rp7. 170. 992. 500	13 3,3 3%	44,4 2%	DPRKP
67	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	8 Desa	Rp14 .618. 705. 350			3 5 Desa	Rp5. 250. 000. 000	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp78 .321. 600	3 6 Desa	Rp29 6.65 0.00 0	6 6 Desa	Rp75 6.32 3.05 0	9 , 0 0 Desa	Rp1. 131. 294. 650	25,7 1%	21,5 5%	9 , 0 0	Rp1. 131. 294. 650	90 0,0 0%	7,74 %	DPRKP
68	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	9 Desa	Rp1. 425. 130. 499	3 3 , 0 0 Desa	4.601.4 19.500	9 3 0 Desa	Rp1. 425. 130. 499	0 Desa	Rp0	0 3 0 Desa	Rp77 .966. 400	6 6 0 Desa	Rp81 5.90 0.00 0	3 3 0 Desa	Rp46 2.71 5.95 0	9 , 0 0 Desa	Rp1. 356. 582. 350	100, 00%	95,1 9%	4 2 0 Desa	Rp5. 958. 001. 850	21 00, 00 %	418, 07%	DPRKP
69	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	Rp10 0.00 0.00 0			1 1 0 Dokumen	Rp10 0.00 0.00 0	0 1 0 Dokumen	Rp0	0 1 0 Dokumen	Rp0	0 1 0 Dokumen	Rp0	1 1 0 Dokumen	Rp81 .696. 000	1 , 0 0 Dokumen	Rp81 .696. 000	100, 00%	81,7 0%	1 , 0 0	Rp81 .696. 000	10 0,0 0%	81,7 0%	DPRKP
70	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	21%	Rp79 .218. 720. 403	6 2 , 1 0 %	71.590. 087.97 0	4 2 , 0 0 %	Rp10 3.72 6.89 4.80 0	0 %	Rp0	8 , 9 7 %	Rp5. 457. 683. 200	1 4 , 5 %	Rp50 .879. 529. 400	6 , 8 1 %	Rp19 .107. 339. 730	3 0 , 2 3 %	Rp75 .444. 552. 330	71,9 7%	72,7 3%	9 2 , 3 3 %	Rp14 7.03 4.64 0.30 0	12 0,7 2%	185, 61%	DPRKP

71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	80 %	Rp78.368.720.403	59,12 %	71.258.507.270	70 %	Rp10.318.689.480.0	0 %	Rp0	14,95 %	Rp5.457.683.200	24,08 %	Rp50.864.986.400	11,35 %	Rp18.612.396.730	50,38 %	Rp74.935.066.330	71,97 %	72,62 %	109,49 %	Rp14.619.357.360.0	136,87 %	186,55 %	DPRKP
72	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	Rp78.368.720.403	1,00 %	71.258.507.270	2 Infrastruktur	Rp10.318.689.480.0	0 Infrastruktur	Rp0	1 Infrastruktur	Rp5.457.683.200	1 Infrastruktur	Rp50.864.986.400	2 Infrastruktur	Rp18.612.396.730	2,00 %	Rp74.935.066.330	100,00 %	72,62 %	3 Infrastruktur	Rp14.619.357.360.0	30,00 %	186,55 %	DPRKP
73	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	268 Unit	Rp78.168.720.403	4,08 %	71.258.507.270	658 Unit	Rp10.298.689.483.3	0 Unit	Rp0	141 Unit	Rp5.457.683.200	227 Unit	Rp50.859.096.000	105 Unit	Rp18.441.595.230	47,03 %	Rp74.758.374.430	71,88 %	72,59 %	941 Unit	Rp14.601.688.170.0	631,54 %	186,80 %	DPRKP
74	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	2 unit	Rp10.000.000.0			2 unit	Rp19.999.967	0 unit	Rp0	0 unit	Rp0	0 unit	Rp5.890.400	2 unit	Rp17.080.150.0	2,00 %	Rp17.669.190.0	100,00 %	88,35 %	2,00 %	Rp17.669.190.0	10,00 %	176,69 %	DPRKP
75	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan	2 Dokumen	Rp10.000.000.0			0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	- Dokumen	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Rp0	0,00 %	0,00 %	DPRKP

97	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	94 %	Rp85 0.00 0.00 0	8 % 9 0 0	331.58 0.700	9 2	%	Rp54 0.00 0.00 0	0 %	Rp0 0 0	0 %	Rp0 0 0	1 1 2 4	%	Rp14 .543. 000	8 0 7 6	%	Rp49 4.94 3.00 0	9 2 0 0	%	Rp50 9.48 6.00 0	100, 00%	94,3 5%	1 8 1 0 0	%	Rp84 1.06 6.70 0	19 2,5 5%	98,9 5%	DPRKP
98	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100 %	Rp40 0.00 0.00 0			5 0	%	Rp19 0.00 0.00 0	0 %	Rp0 0 0	0 %	0 0 0	2 5	%	Rp0 0 0	2 5 0 0	%	Rp18 0.12 1.00 0	5 0 0 0	%	Rp18 0.12 1.00 0	100, 00%	94,8 0%	5 0 0 0	%	Rp18 0.12 1.00 0	50, 00 %	45,0 3%	DPRKP
99	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan	1 Pake t	Rp10 0.00 0.00 0			0 P a k e t		Rp0 0 0	0 P a k e t	Rp0 0 0	0 P a k e t	0 0 0	0 P a k e t		Rp0 0 0	0 P a k e t		Rp0 0 0	- P a k e t		#DIV /0!	#DIV /0!	-		Rp0 0 0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP	
100	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	3 Doku men	Rp20 0.00 0.00 0			2 D o k u m e n		Rp19 0.00 0.00 0	0 D o k u m e n	Rp0 0 0	0 D o k u m e n	0 0 0	1 D o k u m e n		Rp0 0 0	1 D o k u m e n		Rp18 0.12 1.00 0	2 0 0 0	D o k u m e n		100, 00%	94,8 0%	2 0 0 0		Rp18 0.12 1.00 0	66, 67 %	90,0 6%	DPRKP

101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	1 Paket	Rp10.000.000			0 Paket	Rp0	0 Paket	Rp0	0 Paket	0	0 Paket	Rp0	0 Paket	Rp0	- Paket	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Rp0	0,00%	0,00%	DPRKP
102	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	Rp45.000.000	1 kawasan	331.580.700	1 kawasan	Rp35.000.000	0 kawasan	Rp0	0 kawasan	Rp0	1 kawasan	Rp14.543.000	1 kawasan	Rp31.482.200	1 kawasan	Rp32.936.500	100,00%	94,10%	2 kawasan	Rp66.094.570	20,00%	146,88%	DPRKP
104	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	Rp35.000.000	3 Dokumen	331.580.700	3 Dokumen	Rp35.000.000	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp14.543.000	2 Dokumen	Rp31.482.200	3 Dokumen	Rp32.936.500	100,00%	94,10%	6 Dokumen	Rp66.094.570	20,00%	188,84%	DPRKP
96	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,7%	Rp15.642.420.000	96,35%	14.654.535.200	97,57%	Rp25.619.919.626	0%	Rp0	0%	Rp33.017.080	97,4%	Rp21.112.144.350	82,70%	Rp3.098.388.550	92,43%	Rp24.540.703.700	94,74%	95,79%	18,878%	Rp39.195.238.900	31,47%	250,57%	DPRKP
76	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,2%	Rp1.325.000.000			96,4%	Rp1.257.499.626	0%	Rp0	0%	Rp0	0%	Rp0	28,46%	Rp51.345.705.0	28,46%	Rp51.345.705.0	29,63%	40,83%	28,46%	Rp51.345.705.0	29,56%	38,75%	DPRKP

77	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	6 Pendataan	Rp0			5 Pendataan	Rp49.999.626	0 Pendataan	Rp0	0 Pendataan	Rp0	0 Pendataan	Rp0	3 Pendataan	Rp28.587.120.0	3 Pendataan	Rp28.587.120.0	60,00%	57,17%	3 Pendataan	Rp28.587.120.0	50,00%	#DIV/0!	DPRKP
78	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	1 Kecamatan	Rp0			2 Kecamatan	Rp99.999.918	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	2 Kecamatan	Rp94.735.250	2 Kecamatan	Rp94.735.250	100,00%	94,74%	2 Kecamatan	Rp94.735.250	28,57%	#DIV/0!	DPRKP
79	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	-	Rp0			2 Kecamatan	Rp99.999.930	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	2 Kecamatan	Rp95.551.950	2 Kecamatan	Rp95.551.950	100,00%	95,55%	2 Kecamatan	Rp95.551.950	28,57%	#DIV/0!	DPRKP
80	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	1 Kecamatan	Rp0			2 Kecamatan	Rp99.999.918	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	2 Kecamatan	Rp95.584.000	2 Kecamatan	Rp95.584.000	100,00%	95,58%	2 Kecamatan	Rp95.584.000	28,57%	#DIV/0!	DPRKP
81	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	-	Rp0			2 Kecamatan	Rp99.999.930	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	0 Kecamatan	Rp0	- Kecamatan	Rp0	0,00%	0,00%	- Kecamatan	Rp0	0,00%	#DIV/0!	DPRKP

82	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	-	Rp0			2 Ke ca m at an	Rp99.999.930	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	- Ke ca m at an	Rp0	0,00 %	0,00 %	- Ke ca m at an	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
83	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan	-	Rp0			0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	Rp0	0 Ke ca m at an	- Ke ca m at an	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	- Ke ca m at an	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
84	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	100 %	Rp1.225.000.000			40,39 %	Rp757.500.000	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	11,82 %	Rp227.585.850	1 %	29,27 %	30,04 %	11,82 %	Rp227.585.850	11,82 %	18,58 %	DPRKP
85	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	50 Unit	Rp875.000.000			41 unit	Rp717.500.000	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	12 unit	Rp210.000.000	12 unit	29,27 %	29,27 %	12 unit	Rp210.000.000	24,00 %	24,00 %	DPRKP
86	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun	1 Dokumen	Rp0			0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	- Dokumen	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP

87	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan	-	Rp0			0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	- U n i t	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
88	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	10 Unit	Rp35 0.00 0.00 0			0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	- U n i t	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP
89	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun	5 Unit	Rp0			0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	- U n i t	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
90	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	-	Rp0			4 0 U n i t	Rp40 .000. 000	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	1 2 U n i t	Rp17 .585. 850	1 2 U n i t 0 0	Rp17 .585. 850	30,0 0%	43,9 6%	1 2 U n i t 0 0	Rp17 .585. 850	24, 00 %	#DIV /0!	DPRKP
91	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	50%	Rp10 0.00 0.00 0			2 5 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	- %	Rp0	0,00 %	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP
92	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	5 Izin	Rp50 .000. 000			0 I z i n	Rp0	0 I z i n	Rp0	0 I z i n	Rp0	0 I z i n	Rp0	0 I z i n	- I z i n	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP

93	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan	5 Koor dinas i	Rp50.000.000			0 Koor di na si	Rp0	0 Koor di na si	Rp0	0 Koor di na si	Rp0	0 Koor di na si	Rp0	0 Koor di na si	Rp0	- Koor di na si	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	0,00 %	DPRKP
94	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Prosentase sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	Rp0			5 0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	- %	Rp0	0,00 %	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
95	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikoordinasikan	50 Unit	Rp0			0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	0 U n i t	Rp0	- U n i t	Rp0	#DIV /0!	#DIV /0!	-	Rp0	0,0 0%	#DIV /0!	DPRKP
97	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	94 %	Rp6.619.920.000	8 9 , 0 0 %	2.107.035.200	9 2 , 0 0 %	Rp11.219.920.000	0 %	Rp0	0 , 0 %	Rp33.017.080.000	1 1 , 2 4 %	Rp9.807.144.350	8 , 7 6 %	Rp74.743.150.000	9 2 , 0 0 %	Rp10.884.746.650	100, 00%	97,0 1%	1 8 , 1 0 0 %	Rp12.991.781.850	19 2,5 5%	196, 25%	DPRKP
106	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	Rp6.619.920.000	Pe ni ng ka ta n Ku ali ta s	2.107.035.200	2 Peningkatan Kualitas	Rp11.219.920.000	0 Peningkatan Kualitas	Rp0	2 Peningkatan Kualitas	Rp33.017.080.000	2 Peningkatan Kualitas	Rp9.807.144.350	2 Peningkatan Kualitas	Rp74.743.150.000	Pe ni ng ka ta n Ku ali ta s	Rp10.884.746.650	100, 00%	97,0 1%	4 Peningkatan Kualitas	Rp12.991.781.850	20 0,0 0%	196, 25%	DPRKP
108	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	270 Unit	Rp5.662.420.000	U nit , 0 0	1.273.022.000	27 U nit	Rp9.962.420.000	0 U nit	Rp0	0 U nit	Rp75.600.000	33 U nit	Rp9.533.836.850	23 U nit	Rp342.700.000	27 U nit	Rp9.952.136.850	100,00 %	99,90 %	U nit 33 1	Rp11.225.158.850	122, 59%	198,24 %	DPRKP

109	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koor dinas i	Rp85 7.50 0.00 0	3 Ko or di na si	834.01 3.200	3 Ko or di na si	Rp1. 257. 500. 000	0 Ko or di na si	Rp0	3 Ko or di na si	Rp25 4.57 0.80 0	3 Ko or di na si	Rp27 3.30 7.50 0	3 Ko or di na si	Rp40 4.73 1.50 0	3 Ko or di na si	Rp93 2.60 9.80 0	100, 00%	74,1 6%	6 Ko or di na si	Rp1. 766. 623. 000	20 0,0 0%	206, 02%	DPRKP
113	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	96,2 7%	Rp7. 697. 500. 000	% 8 9 , 9 0	12.547. 500.00 0	9 % 6 , 0 4	Rp13 .142. 500. 000	0 %	Rp0	0 % , 0 0	Rp0	9 % , 8 5	Rp11 .305. 000. 000	8 % 6 , 0 7	Rp1. 837. 500. 000	% 9 5 , 9 1	Rp13 .142. 500. 000	99,8 7%	100, 00%	1 % 8 5 , 8 1	Rp25 .690. 000. 000	19 3,0 1%	333, 74%	DPRKP
114	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perb aika n RTLH	Rp7. 697. 500. 000	1 Pe rb ai ka n RT LH	12.547. 500.00 0	1 Pe rb ai ka n RT LH	Rp13 .142. 500. 000	0 Pe rb ai ka n RT LH	Rp0	0 Pe rb ai ka n RT LH	Rp0	1 Pe rb ai ka n RT LH	Rp11 .305. 000. 000	1 Pe rb ai ka n RT LH	Rp1. 837. 500. 000	1 Pe rb ai ka n RT LH	Rp13 .142. 500. 000	100, 00%	100, 00%	2 Pe rb ai ka n RT LH	Rp25 .690. 000. 000	20 0,0 0%	333, 74%	DPRKP
115	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	348 Unit	Rp7. 697. 500. 000	7 U nit 1 , 0 0	12.547. 500.00 0	7 U nit 1	Rp13 .142. 500. 000	0 U nit	Rp0	0 U nit	Rp0	7 U nit	Rp11 .305. 000. 000	6 U nit 3	Rp1. 837. 500. 000	7 U nit 5 0 , 0 0	Rp13 .142. 500. 000	99,8 7%	100, 00%	1 U nit . 4 6 7	Rp25 .690. 000. 000	14 6,7 0%	333, 74%	DPRKP

116	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggara an bangunan gedung	90,06 %	Rp459.155.500	6 % 7,48	115.162.356	7 % 8,94	Rp400.000.000	2 % 9,31	Rp0	2 % 8,53	Rp38.081.200	2 % 2,67	Rp73.632.900	1 % 4,85	Rp129.915.200	9 % 5,35	Rp241.629.300	120,79%	60,41%	16 % 2,83	Rp356.791.656	180,81%	77,71%	DPRKP
117	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	30 %	Rp300.000.000	2 % 6,00	104.287.356	2 % 8	Rp300.000.000	1 % 0,10	Rp0	9 % 8,3	Rp38.081.200	8 % 2,1	Rp73.632.900	5 % 7,9	Rp89.907.600	3 % 3,92	Rp201.621.700	121,15%	67,21%	59 % 9,92	Rp305.909.056	199,74%	101,97%	DPRKP
118	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyele nggar aan	Rp300.000.000	2 Penyele nggar aan	104.287.356	2 Penyele nggar aan	Rp300.000.000	1 Penyele nggar aan	Rp0	1 Penyele nggar aan	Rp38.081.200	1 Penyele nggar aan	Rp73.632.900	1 Penyele nggar aan	Rp89.907.600	2 Penyele nggar aan	Rp201.621.700	100,00%	67,21%	4 Penyele nggar aan	Rp305.909.056	200,00%	101,97%	DPRKP
119	Penyelenggaraa n Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	Rp300.000.000	2 Un it 0,00	104.287.356	2 Un it 0,00	Rp300.000.000	7 Un it 5,00	Rp0	7 Un it 3,00	Rp38.081.200	5 Un it 8,00	Rp73.632.900	3 Un it 8,00	Rp89.907.600	2 Un it 4,00	Rp201.621.700	122,00%	67,21%	4 Un it 4,00	Rp305.909.056	220,00%	101,97%	DPRKP

120	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	100 %	Rp15 9.15 5.50 0	3 % 3 3 3	10.875.000	6 % 6 , 6 6	Rp10 0.00 0.00 0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	3 % 3 , 3 3	Rp40 .007.600	3 % 3 , 3 3	Rp40 .007.600	50,0 0%	40,0 1%	6 % 6 , 6 6	Rp50 .882.600	66, 66 %	31,9 7%	DPRKP
121	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	77,7 7%	Rp15 9.15 5.50 0	1 % 1 1 1	10.875.000	4 % 4 , 4 4	Rp10 0.00 0.00 0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	2 % 2 , 2 2	Rp40 .007.600	2 % 2 , 2 2	Rp40 .007.600	50,0 0%	40,0 1%	3 % 3 , 3 3	Rp50 .882.600	42, 86 %	31,9 7%	DPRKP
122	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	3 PSU	Rp15 9.15 5.50 0	1 P S 0 U	10.875.000	2 P S U	Rp10 0.00 0.00 0	0 P S U	Rp0	0 P S U	Rp0	0 P S U	Rp0	1 P S U	Rp40 .007.600	1 P S 0 U	Rp40 .007.600	50,0 0%	40,0 1%	2 P S U	Rp50 .882.600	66, 67 %	31,9 7%	DPRKP
123	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	80 %	Rp27 .773.538.061	1 % 1 , 8 6	31.777.482.900	6 % 0	Rp44 .125.000.000	0 % 0 0	Rp0	0 % 0 0	Rp91 .975.400	2 % 9 , 5 2	Rp17 .314.667.200	2 % 6 , 8 8	Rp18 .865.431.415	5 % 6 , 4 0	Rp36 .272.074.015	94,0 0%	82,2 0%	6 % 8 , 2 6	Rp68 .049.556.915	85, 33 %	245, 02%	DPRKP
124	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Peny elen ggar aan	Rp9. 111. 130. 661	2 Pe ny el 0 en gg ar aa n	3.943.194.450	2 Pe ny el en gg ar aa n	Rp8. 625. 000. 000	0 Pe ny el en gg ar aa n	Rp0	1 Pe ny el en gg ar aa n	Rp79 .200. 000	2 Pe ny el en gg ar aa n	Rp0	2 Pe ny el en gg ar aa n	Rp4. 494. 052. 665	2 Pe ny el 0 en gg ar aa n	Rp4. 573. 252. 665	100, 00%	53,0 2%	4 Pe ny el en gg ar aa n	Rp8. 516. 447. 115	20 0,0 0%	93,4 7%	DPRKP

125	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	6 Unit	Rp9.111.130.661	1 Unit	3.943.194.450	3 Dokumen	Rp8.625.000.000	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp79.200.000	1 Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp4.494.052.665	3 Dokumen	Rp4.573.252.665	100,00%	53,02%	14 Unit	Rp8.516.447.115	46,67%	93,47%	DPRKP
126		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor					6 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras				3 Sarpras	3 Sarpras		6 Sarpras									
127		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan					2 Gedung kantor	0 Gedung kantor	0 Gedung kantor				0 Gedung kantor	2 Gedung		2 Gedung									
128	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	40 %	Rp18.187.407.400	3,465 %	27.770.632.500	39,0 %	Rp35.150.000.000	0 %	Rp0	0 %	Rp0	19,34 %	Rp17.283.320.550	17,24 %	Rp14.324.354.900	36,58 %	Rp31.607.675.450	93,80%	89,92%	71,24 %	Rp59.378.307.950	17,89%	326,48%	DPRKP
129	Penyelenggara n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp18.187.407.400	1,00 Penataan Bangunan	27.770.632.500	1 Penataan Bangunan	Rp35.150.000.000	0 Penataan Bangunan	Rp0	0 Penataan Bangunan	Rp0	1 Penataan Bangunan	Rp17.283.320.550	1 Penataan Bangunan	Rp14.324.354.900	1,00 Penataan Bangunan	Rp31.607.675.450	100,00%	89,92%	2 Penataan Bangunan	Rp59.378.307.950	20,00%	326,48%	DPRKP
130	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	200 Unit	Rp18.187.407.400	1,81 Unit	27.770.632.500	24,2 Unit	Rp35.150.000.000	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	120 Unit	Rp17.283.320.550	107 Unit	Rp14.324.354.900	227,00 Unit	Rp31.607.675.450	93,80%	89,92%	408 Unit	Rp59.378.307.950	20,40%	326,48%	DPRKP

131	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24 %	Rp475.000,00	9 %	63.655.950	24 %	Rp350.000,00	0 %	Rp0	4 %	Rp12.775.400	1 %	Rp31.346.650	6 %	Rp47.023.850	2 %	Rp91.145.900	103,71%	26,04%	3 %	Rp154.801.850	13,85%	32,59%	DPRKP
132	Penyelenggara n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggara an	Rp275.000,00	Pe ny el en gg ar a an	40.193.350	2 Pe ny el en gg ar a an	Rp200.000,00	0 Pe ny el en gg ar a an	Rp0	1 Pe ny el en gg ar a an	Rp5.718.400	1 Pe ny el en gg ar a an	Rp1.156.650	1 Pe ny el en gg ar a an	Rp47.023.850	Pe ny el en gg ar a an	Rp53.898.900	50,00%	26,95%	3 Pe ny el en gg ar a an	Rp94.092.250	15,00%	34,22%	DPRKP
133	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	150 Orang	Rp200.000,00	3 Or an g	36.393.350	1 Or an g	Rp150.000,00	0 Or an g	Rp0	3 Or an g	Rp5.718.400	6 Or an g	Rp1.156.650	4 Or an g	Rp47.023.850	Or an g	Rp53.898.900	130,00%	35,93%	1 Or an g	Rp90.292.250	10,93%	45,15%	DPRKP
134	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	150 Orang	Rp75.000,00	3 Or an g	3.800.000	1 Or an g	Rp50.000,00	0 Or an g	Rp0	3 Or an g	Rp0	6 Or an g	Rp0	4 Or an g	Rp0	1 Or an g	Rp0	130,00%	0,00%	1 Or an g	Rp3.800.000	10,93%	5,07%	DPRKP
137	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha konstruksi yang diawasi	57,14%	Rp200.000,00			2 %	Rp150.000,00	1 %	Rp0	1 %	Rp7.057.000	1 %	Rp30.190.000	0 %	Rp0	%	Rp37.247.000	62,00%	24,83%	1 %	37247000	31,00%	18,62%	DPRKP
138	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000,00			1 D ok u men	Rp0	0 D ok u men	Rp0	0 D ok u men	0	0 D ok u men	Rp0	0 D ok u men	Rp0	-	Rp0	0,00%	#DIV/0!	0 D ok u men	0	0,00%	0,00%	DPRKP

139	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraa n dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 Oran g	Rp10 0.00 0.00 0			1 0 0 Or an g	Rp10 0.00 0.00 0	0 Or an g	Rp0	0 Or an g	0	7 0 Or an g	Rp30 .190. 000	0 Or an g	Rp0	7 0 Or an g	Rp30 .190. 000	70,0 0%	30,1 9%	7 0 Or an g	3019 0000	70, 00 %	30,1 9%	DPRKP
140	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraa n dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 Bada n Usah a Jasa Kons truks i	Rp75 .000. 000			5 0 Ba da n Us ah a	Rp50 .000. 000	7 Ba da n Us ah a	Rp0	6 Ba da n Us ah a	Rp7. 057. 000	5 Ba da n Us ah a	Rp0	5 Ba da n Us ah a	Rp0	2 3 Ba da n Us ah a	Rp7. 057. 000	46,0 0%	14,1 1%	2 3 Ba da n Us ah a	7057 000	23, 00 %	9,41 %	DPRKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									

Faktor Penghambat :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Tidak ada anggaran khusus bencana/ tanggap darurat yang sifatnya bisa dipergunakan sewaktu-waktu dengan jumlah nominal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kerusakan

Dari jumlah laporan yang masuk masih banyak data yang tidak sesuai dengan tupoksi penanganan rumah bagi korban bencana

Sebagian korban bencana ada yang sudah merehab rumahnya sendiri, ada juga yang menolak

Cuaca dan tingginya intensitas bencana

Lokasi yang ekstrem

2 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH :

penampungan material dilokasi kurang memadai, sehingga bahan dikirim bertahap, menunggu hari baik, menunggu tukang (bergantian antar PB)

Anggaran daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan RTLH

Masyarakat yang tidak mampu berswadaya

Kekurangan tenaga/pelaksana di dinas

3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Untuk IPLT masih menunggu kajian lebih lanjut terkait RISPAL sehingga untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan

Belum jelasnya definisi operasional dari sub kegiatan tersebut sehingga ragu untuk melaksanakan kegiatannya

4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kesulitan mencari/menemukan strategi-strategi dalam penyampaian info kepada publik

Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK

5 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kesulitan dalam pengumpulan data

Kesulitan dalam berkoordinasi dengan OPD terkait

6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Gedung Proppo dan gedung Polinema dan sarana prasarana gedung masih dalam tahap perencanaan

7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK

8 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persyaratan/kelengkapan administrasi penyerahan PSU dari pengembang masih belum lengkap.

Masih proses pembangunan, sehingga PSU belum bisa diserahkan.

9 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM

Tidak ditemukan sumber air saat pengeboran

Terjadi longsor saat pengeboran

Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan PAK

Belum jelas bentuk kegiatannya seperti apa dan utk kelembagaan SPAM perkotaan blm ada

Belum jelasnya lokasi Kegiatan PAMSIMAS saat itu dan adanya perbedaan/perubahan nilai anggaran per lokasi penerimanya.

10 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

kurang minatnya badan usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Belum ada peraturan jakon / NSPK yang mengatur kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota tentang pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Ada peserta yang sudah mendaftar pelatihan namun ketika hari pelaksanaannya tidak hadir

➤ PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

